SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

BAB II

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta prioritas lokasi sasaran.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS SITUASI
BAB III : METODE KAJIAN
BAB IV : PELAKSANAAN PANGAN DAN GIZI
BAB V : PEMANTAUAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
BAB VI : PENUTUP

(2) Penjabaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan pedoman untuk Menyusun RKPD sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III

PELAKSANAAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 5

(1) Terintegrasi dengan pendekatan konvergensi stunting, Germas, dan PUG,

(2) Data produksi pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan cukup lengkap.

BAB IV

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

(2) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RAD PG bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 28 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan dan gizi merupakan faktor fundamental dalam pembangunan manusia Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar yang pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan aman berkontribusi langsung terhadap status gizi masyarakat, yang pada gilirannya membentuk sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pembangunan pangan dan gizi adalah investasi strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah telah menetapkan percepatan perbaikan pangan dan gizi sebagai prioritas, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam RPJMN 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya SDM unggul, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Badan Pangan Nasional (NFA) tengah menyusun Rencana Pangan Nasional 2025–2029, yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dokumen ini ditujukan agar selaras dengan struktur RPJMN 2025–2029 serta RPJPN 2025–2045, sehingga strategi nasional terkait pangan dapat diterjemahkan secara konkret dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RAD-PG.

Belum terdapat publikasi resmi atau dokumen final mengenai RAN-PG periode 2025–2029, maka dalam kajian ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021–2024 mengusung pendekatan multisektor untuk memastikan integrasi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor. Dalam implementasinya, keberhasilan pembangunan pangan dan gizi sangat

bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media (pentahelix). Kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 22,6%, masih di atas target nasional 14% pada tahun 2024. Selain itu, data Dinas Ketahanan Pangan setempat menunjukkan bahwa 8,4% rumah tangga tergolong rawan pangan, dan 23,7% penduduk memiliki konsumsi energi di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Tantangan lain meliputi:

- Rendahnya diversifikasi pangan berbasis lokal
- Keterbatasan akses pangan bergizi di wilayah pedesaan terpencil
- Masih ditemukannya kasus gizi kurang dan anemia pada ibu hamil

Keterkaitan dengan SDGs, RPJMN, dan Prioritas Nasional Penyusunan RAD-PG Tubaba memiliki keterkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya:

- Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan
- Target 2.2: Mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2025, termasuk mencapai target internasional terkait stunting dan wasting pada anak di bawah 5 tahun. Dalam RPJMN 2025–2029, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu Prioritas Nasional. Oleh karena itu, RAD-PG Tubaba diarahkan untuk mengintegrasikan strategi ketahanan pangan dan gizi dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting), sehingga intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

Urgensi Integrasi RAD-PG dengan Percepatan Penurunan Stunting RAD-PG memiliki peran strategis dalam menyediakan kerangka operasional yang menghubungkan program ketahanan pangan dengan program perbaikan gizi. Integrasi ini penting karena:

1. Akar masalah stunting tidak hanya pada gizi buruk, tetapi juga pada akses pangan bergizi, sanitasi, kesehatan, dan perilaku hidup sehat.
2. RAD-PG menjadi platform koordinasi lintas sektor (pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat).
3. Memastikan seluruh kegiatan terkait pangan dan gizi di Tubaba terarah pada penurunan stunting sesuai target nasional dan daerah.

1.2 Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

RAD-PG merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Tubaba di bidang pangan dan gizi. Dokumen ini mengacu pada RAN-PG serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 dan SDGs.

Secara nasional, RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi, yang terintegrasi dengan:

→ Stranas Percepatan Penurunan Stunting

→ Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

→ Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Di tingkat daerah, RAD-PG menjadi acuan bagi perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Renja dan RKPD, sekaligus menjadi panduan monitoring dan evaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi.

1.3 Rumusan Masalah

1. Pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang peran mereka dalam rencana aksi pangan dan gizi masih terbatas.
2. Kemampuan menganalisis situasi pangan dan gizi di wilayah Tubaba belum optimal, sehingga penetapan prioritas penanganan kurang terarah.
3. Koordinasi antar-sektor dalam pembangunan ketahanan pangan dan penurunan stunting belum terintegrasi secara efektif dari perencanaan hingga evaluasi.
4. Belum tersusunnya strategi, arah kebijakan, dan prioritas program/kegiatan secara komprehensif untuk peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memberikan panduan, arahan, dan acuan kepada OPD, DPRD, perguruan tinggi/litbang, institusi pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Tubaba.

Tujuan:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran aktif seluruh stakeholder dalam ketahanan pangan dan penurunan stunting.
2. Memperkuat kemampuan analisis situasi pangan dan gizi untuk menetapkan prioritas penanganan serta memantau dan mengevaluasi perkembangan di Tubaba.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara terencana dan terukur.
4. Menyusun strategi, arah kebijakan, dan prioritas program/kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

1.5 Ruang Lingkup

Mengacu pada 5 pilar pembangunan pangan dan gizi:

1. Perbaikan gizi masyarakat (ibu pra-hamil, hamil, dan anak balita) melalui layanan kesehatan berkelanjutan dan intervensi gizi efektif.
2. Peningkatan aksesibilitas pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk keluarga rawan pangan dan miskin.
3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, termasuk pangan jajanan dan PIRT.
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), diversifikasi konsumsi pangan lokal, dan revitalisasi posyandu.
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat kabupaten hingga desa.

1.6 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS SITUASI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Ketahanan Pangan dan Sistem Ketahanan Pangan

Definisi Ketahanan Pangan sangat beragam, saat ini di Indonesia acuan utama yang digunakan untuk menjelaskan adalah yang ada dalam UU Pangan No 18/2012. Definisi Ketahan Pangan disini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sistem Ketahan Pangan di Indonesia secara umum terdiri dari tiga subsistem, yaitu : ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan (Nuhfil, 2009 dan Suryana, 2014) seperti pada gambar 1.

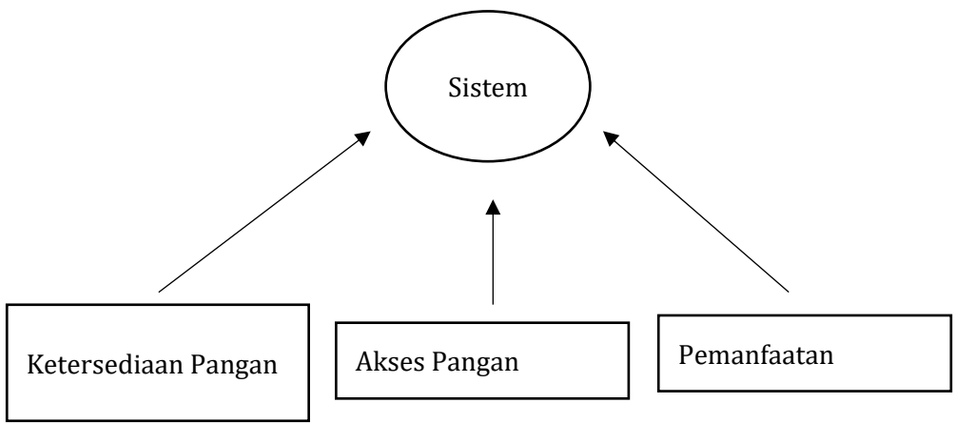

Gambar II-1. Sistem Ketahanan Pangan Nasional

Menurut FAO (2017), sistem KP tersusun atas empat komponen utama yaitu: Ketersediaan, Akses, Penyerapan dan Stabilitas Pangan seperti terlihat pada gambar II-2.

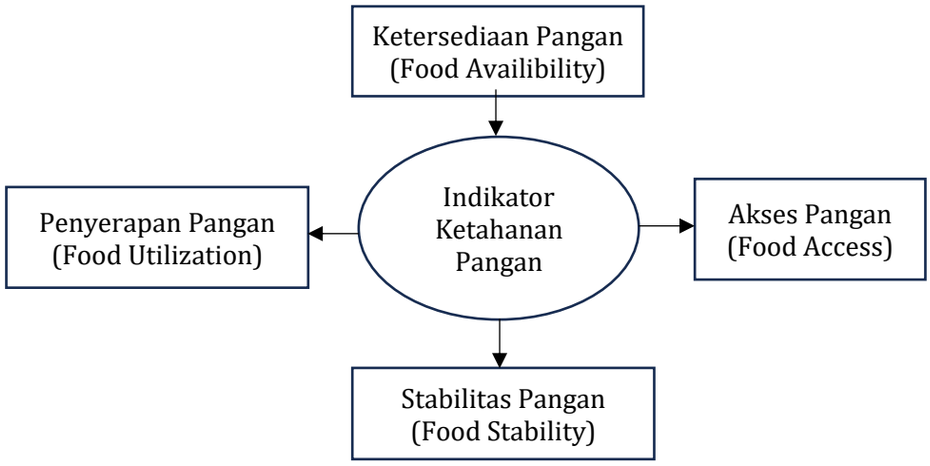

Gambar II-2. Komponen Ketahanan Pangan Menurut FAO (2017)

Dalam perkembangannya Kastaman (2012) menunjukkan, ada empat hal pokok yang perlu termuat dalam sistem Ketahanan Pangan, yaitu: ketersediaan dan kerawanan pangan, akses pangan, pemanfaatan dan mutu pangan serta aspek kelembagaan da regulasi pangan, seperti terlihat pada gambar II-3.

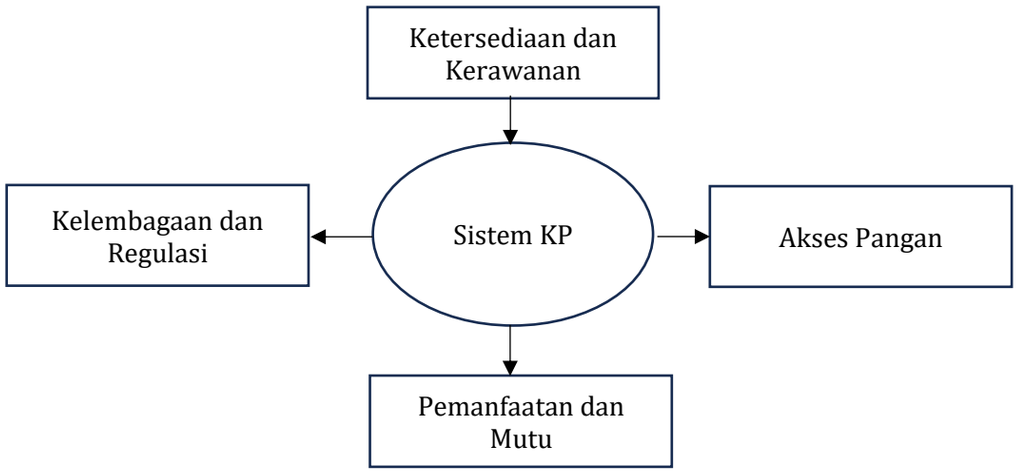

Gambar II-3. Komponen Ketahanan Pangan Kastaman (2012)

Aspek kelembagaan menjadi pembeda dari sistem Ketahanan Pangan menurut FAO (2017), Hanani (2019) dan Suryana (2014). Menurut Kastaman (2012) termuatnya indikator dari dimensi kelembagaan tersebut dalam suatu kajian sistem Ketahanan Pangan lebih sesuai untuk situasi dan kondisi di Indonesia, mengingat keberadaan lembaga yang terkait Ketahanan Pangan menjadi jaminan terselenggaranya kondisi Ketahanan Pangan di suatu wilayah dengan perannya untuk merencanakan, memonitor, dan mendukung pelaksanaan serta evalusinya.

Selama ini mayoritas pendekatan Ketahanan Pangan sering gagal untuk mengidentifikasi secara sistem, dikarenakan analisa yang dilakukan umumnya pada masalah kerentanan. Analisa kerentanan cenderung hanya mengukur kerentanan masyarakat/individu untuk rusak/lemah pada saat terkena bencana/guncangan tertentu, sehingga hanya fokus pada satu variabel target khusus dan bersifat jangka pendek. Untuk relevansi penanganan jangka panjang kurang, dikarenakan minimnya ketersediaan panel data yang terpercaya (Azam dan Imai, 2009). Karena itu perlu ada pendekatan alternatif berdasarkan pada hal yang lebih komprehensif dari perspektif sistem yang mampu membantu mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari kerawanan pangan dilihat dari berbagai proses sistem pangan (Awasthi dan Singh, 2010). Berdasarkan kondisi diatas maka sistem Ketahanan Pangan yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi sistem Ketahanan Pangan Kastaman (2012). Adapun uraian indikator dari komponen Ketahanan Pangan yang dipergunakan akan disesuaikan melalui seleksi dengan menggunakan metode sintesa.

2.1.2 Penggolongan Pangan dan Gizi

Klasifikasi pangan sangat berguna dalam perencanaan produksi,ketersediaan pangan dan konsumsi pangan penduduk. Secara umum, pangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pangan hewani dan pangan nabati. Sedangkan penggolongan pangan oleh FAO dikenal sebagai *Desirable Dietary Pattern* (Pola Pangan harapan atau PPH). Kelompok pangan dalam PPH ada 9 yaitu: padi- padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah serta lain-lain (minuman dan bumbu) (Yuniatuti, 2008). Padi-padian adalah pangan yang berasal dari tanaman serealia yang biasa dikonsumsi sebagai pangan pokok seperti padi, jagung, sorgum, dan produk lahan olahannya sepertib utiran, tepung atau (terigu, beras), pasta (bihun, macaroni,mi). Umbi-umbian menjadi jaminan terselenggaranya kondisi Ketahanan Pangan di suatu wilayah dengan perannya untuk merencanakan, memonitor, dan mendukung pelaksanaan serta evaluasinya.

Selama ini mayoritas pendekatan Ketahanan Pangan sering gagal untuk mengidentifikasi secara sistem, dikarenakan analisa yang dilakukan umumnya pada masalah kerentanan. Analisa kerentanan cenderung hanya mengukur kerentanan masyarakat/individu untuk rusak/lemah pada saat

terkena bencana/guncangan tertentu, sehingga hanya fokus pada satu variabel target khusus dan bersifat jangka pendek. Untuk relevansi penanganan jangka panjang kurang, dikarenakan minimnya ketersediaan panel data yang terpercaya (Azam dan Imai, 2009). Karena itu perlu ada pendekatan alternatif berdasarkan pada hal yang lebih komprehensif dari perspektif sistem yang mampu membantu mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari kerawanan pangan dilihat dari berbagai proses sistem pangan (Awasthi dan Singh, 2010). Berdasarkan kondisi diatas maka sistem Ketahanan Pangan yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadop sisistem Ketahanan Pangan Kastaman (2012). Adapun uraian indikator dari komponen Ketahanan Pangan yang dipergunakan akan disesuaikan melalui seleksi dengan menggunakan metode sintesa.

2.1.3 Pangan dan Gizi sebagai Pilar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator keberhasilan yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan manusia (IPM). Peranan pangan dan gizi sangatlah penting dalam uapaya pembangunan sumber daya manusia. Potensi manusia yang dibawa sejak lahir dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu beriman, sehat fisik, mental, dan sosial. Dengan konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan dapat lebih meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang mahaesa, mampu mengembangkan iptek, dan meningkatkan kesejahteraan (Ari Agung, 2008; Sri Handayani, 1996). Pembangunan keadaan pangan, gizi, dan kesehatan penduduk di Indonesia secara umum telah meningkat. Akan tetapi belum semua penduduk telah tercukupi kebutuhan pangan dan gizinya.

2.1.4 Pengukuran Ketahanan Pangan

Menurut Tri Yulianti dan Nur Aini (2011) ketahanan pangan dapat diukur dengan dua metode: yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan survey pengeluaran rumah tangga atau asupan pangan individu. Menurut Smith (2002 dalam Antang, 2002), terdapat empat variable yang digunakan untuk ketahanan pangan rumah tangga yaitu:

a) Jumlah konsumsi energy rumah tangga
b) Tingkat kecukupan energi
c) Diversifikasi pangan
d) Persen untuk pengeluaran pangan

2.1.5 Indikator Ketahanan Pangan

Indokator ketahanan pangan menurut (Achmad Suryana, 2014; Ariani, 2004)

Subsistem	Indikator	Standar Ideal
Ketersediaan pangan	Ketersediaan energi perkapita	Ketersediaan perkapita minimal 2400 kkal per hari
	Ketersediaan protein perkapita	Ketersediaan protein perkapita minimal 2063 gram perhari
	Cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan minial 20 persen dari kebutuhan
Akses pangan	Stabilitas harga pangan	Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum 10 sampai 25 persen antara waktu normal dan tidak normal
	Akses terhadap sistem informasi dan kewaspadaan pangan	Adanya sistem informasi harga pangan, dan berkembang sampai desa
	Pengeluaran untuk pangan	Persen pengeluaran pangan < 80% pendapatan
	Akses untuk transportasi	Tersedianya angkutan umum
Penyerapan pangan	Kecukupan energi dan perkapita perhari	Angka kecukupan energi minimal 2000 kkal/hari
	Kecukupan protein perkapita perhari	Angka kecukupan protein minimal 52 gram/hari
	Kecukupan gizi mikro	Kecukupan zat besi, yodium dan lain-lain
	Penganekaragaman pangan	Pola pangan harapan dengan skor PPH 100
	Penurunan kasus keracunan pangan	
Status gizi	Tingkat kerawanan masyarakat (<70% AKG)	Persen kelaparan <2,5%
	Balita gizi kurang dan buruk	Persen balita gizi kurang dan buruk <2,5%.

2.1.6 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketahanan Pangan

Faktor-faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan rumah tangga:

a) Tingkat pendidikan pengelo pangan rumah tangga

Tingkat pendidikan ibu berhubungan dengan ketahanan pangan melalui konsumsi rumah tangga dan pendidikan kepala rumah tangga turut mempengaruhi pula, akan tetapi tidak sebesar pengaruh akibat tingkat pendidikan ibu (Tanziha, 2005).

b) Tingkat pendapatan rumah tangga.

c) Struktur rumah tangga

Struktur rumah tangga berhubungan dengan ketahanan pangan rumah tangga. Struktur rumah tangga yang dimaksud didefinisikan sebagai komposisi rumah tangga yang terdiri dari anggota rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga berhubungan dengan pengeluaran untuk pangan. Meningkatnya jumlah anggota rumah tangga tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka pendistribusian konsumsi pangan keluarga tersebut tidak cukup untuk mencegah kejadian kurang gizi (Tri Yuliantidan Nur Aini, 2011).

2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan

Mempengaruhi Ketahanan PanganMenurut Ali Sadikin dan Panggih (2008) dan Hasman hasyim (2007):

a) Stok beras

Jumlah beras yang disimpan setiap tahun dapat menjadi salah satu indikator ketahanan pangan. Semakin banyak beras yang dapat disimpan oleh suatu daerah.

b) Luas areal panen padi

Pertanian adalah sector terbesar dalam hamper setiap ekonomi Negara berkembang. Sector ini menyediakan pangan bagi sebagian penduduknya, menghasilkan bahan mentah, bahan baku atau penolong bagi industry dan menjadi sumber terbesar penerimaan devisa (Silitonga, 1996).

c) Produktivitas lahan padi

Keahlian ataupun tentang pertanian menjadi faktor yang sangat mempengaruhi produktifitas suatu lahan. Dapat dikatakan semakin berpendidikan petani-petani disuatu wilayah maka keberhasilan produksi akan semakin meningkat.

d) Jumlah konsumsi beras perkapita

Pemerintah puasat maupun pemerintah daerah sedang menerapkan diversifikasi pangan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah konsumsi beras. Ketergantungan yang sangat besar terhdap beras telah menggusur budaya makan pangan lokal yang beragam dan sudah teruji sejarah yang berlansung berabad-abad. Saat ini 95% perut penduduk Indonesia sanagat tergantung pada makanan yang bernama nasi.

e) Harga beras

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah membuat kebijakan terhadap harga beras yaitu harga pembelian pemerintah(HPP). Kebijakan tersebut bertujuan agar petani padi menerima harga gabah yang layak, sehingga mereka menerima insentif untuk meningkatkan produktivitas.

f) Curah hujan

Pertanian, terutama pertanian pangan merupakan sector yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, khususnya yang mengakibatkan musim kering berkepanjangan, mengingat petani indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang berarti sangat memerlukan air yang tidak sedikit.

2.1.8 Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2003) Pengertian sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan pengertian secara mikro. Pengertian secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga Negara suatu Negara atau dalam batas wilayah. Sumber daya manusia (human resources) dari suatu bangsa tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro M.P., pembangunan ekonomi di dunia ketiga, 1999) sejarah mencatat bahwa Negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktifitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami diminishing retur tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan (kuncoro, 1997).

Menurut UNDP (United Nations Development Programe), untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinaju dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. nilai indeks iniberkisar antara 0-100.

2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indek pembangunan manusia yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (UJNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Produktivitas

   Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.

2) Pemerataan

   Dalam hal mendapatkan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kesinambungan

   Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidakhanya generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbaharui.

4) Pemberdayaan

   Penduduk dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah

kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan.

2.1.10 Kompenen Pembangunan Manusia

a) Indeks Harapan Hidup

   Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (*Life Expectancy of Birth*) dan angka kematian bayi perseribu penduduk (*Infan Mortality Rate*). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian pertahunnya, dimana variabel tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat, dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi orang yang meninggal pada waktu tertentu.

b) Tingkat pendidikan dengan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).

c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita pertahun.

2.1.11 Strategi Badan Ketahanan Pangan

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan, arah kebijakan penetapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi:

1) Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk:
   a) Meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik
   b) Menyediakan lapangan kerja
   c) Meningkatkan pendapatan masyarakat Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama (masyarakat miskin kronis (sangat miskin) dan transien akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuann pangan
   d) Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
   e) Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan berbasis sumber daya lokal.
   f) Penanganan keamanan pangan segar.

2.1.12 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lingkup penyelenggaraan pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan nasional, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Menurut Undang-Undang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pemenuhan pangan tersebut bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Impor pangan merupakan upaya terakhir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila kebutuhan pangan tersebut benar-benar tidak dapat dipenuhi dari kedua sumber pangan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 disebutkan bahwa Peningkatan Kedaulatan Pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ke depan. Disebutkan dalam dokumen tersebut bahwa Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Kebijakan ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan nasional, maka sasaran utama yang ingin diwujudkan terkait dengan bidang pangan adalah sebagai beikut:

1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. Sedangkan produksiikan untuk mendukung penyediaan sumber protein. Produksi garam ditargetkan untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga.
2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan akan dikembangkan integrasi Sistern Logistik.
3) Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistim Logistik Nasional dan penerapan sistem rantai dingin di 100 sentra perikanan.
4) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan.
5) Terwujudnya perbaikan sistem manajemen Wilayah PengelolaanPerikanan (WPP) untuk menjaga keberlanjutan kelimpahan stok sumberdaya ikan. Kelimpahan sumberdaya ikan ini dipertahankan dengan mewujudkan manajemen sumberdaya dan kawasan perikanan berkelanjutan.
6) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi untuk menggantikan alih fungsi lahan.
7) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deterioriasi.
8) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi.
9) Terbangunnya jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, yaitu:

a) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri;
b) Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan;
c) Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat;
d) Mitigsi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan;
e) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

2.1.13 Situasi Pangan dan Gizi.

1. Situasi Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Situasi pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan digambarkan melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, akses pangan dan stabilitas harga pangan, serta konsumsi pangan.

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Menurut Sawitdan Ariani bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan. Sementara itu penentu utama ditingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (2016) salah satu kunci terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh

pangan. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan. Hukum Working 1943 menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU Pangan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Beberapa peraturan lain yang sedang dalam proses penyusunan adalah PP tentang label dan iklan pangan, PP tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan nasional. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya. Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah rumah tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan

merupakan residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada pasar pangan yang cenderung bersifat *thin market*.

2.1.14 Kerangka Tujuan Strategis RAN-PG 2025–2029

Kerangka Tujuan Strategis Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) mengacu pada empat tujuan utama:

1. **Ketersediaan**
    - Meningkatkan kapasitas produksi pangan berbasis sumber daya lokal.
    - Menjamin keberlanjutan pasokan melalui perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
    - Mengembangkan cadangan pangan di semua tingkatan.
2. **Keterjangkauan (Aksesibilitas)**
    - Memperbaiki distribusi pangan agar merata di seluruh wilayah.
    - Menjaga stabilitas harga pangan pokok.
    - Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan.
3. **Pemanfaatan (Utilisasi)**
    - Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
    - Mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
    - Memperkuat edukasi gizi seimbang.
4. **Kelembagaan**
    - Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pangan dan gizi.
    - Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan early warning pangan-gizi.
    - Memperkuat kapasitas kelembagaan daerah.

2.1.15 Isu Lintas Sektor

Isu lintas sektor yang menjadi perhatian utama dalam implementasi RAN-PG di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup:

1. **Pengarusutamaan Gender**
    - Peningkatan partisipasi perempuan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi pangan.
    - Pemberdayaan kelompok wanita tani untuk diversifikasi pangan.
2. **Ketahanan Pangan Darurat**
    - Penguatan cadangan pangan tanggap darurat bencana.
    - Penyediaan logistik pangan cepat dan terkoordinasi.

3. **Pangan Lokal**
    - Revitalisasi pangan berbasis komoditas lokal (umbi-umbian, sagu, jagung).
    - Dukungan rantai nilai dan pemasaran produk pangan lokal.
4. **Biofortifikasi**
    - Pengembangan varietas pangan kaya zat gizi mikro (Fe, Zn, vitamin A).
    - Sosialisasi dan adopsi pangan biofortifikasi di tingkat rumah tangga.

2.1.16 Hasil Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2024 dan data BPS, peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan:

- Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki ketahanan pangan cukup tinggi
- Kecamatan dengan kerentanan sedang–tinggi: ditandai oleh tingginya proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan >70% pendapatan, akses air bersih rendah, dan prevalensi balita stunting di atas rata-rata kabupaten.
- Faktor penentu kerentanan: rendahnya diversifikasi pangan, keterbatasan infrastruktur transportasi pangan, dan ketergantungan pada komoditas tunggal (padi/beras).

2.1.17 Analisis Gap Kebijakan dan Implementasi

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kebijakan nasional/ daerah dengan implementasi di lapangan:

Aspek	Kebijakan	Implementasi di Lapangan	Gap yang Teridentifikasi
Ketersediaan	Peningkatan produksi pangan lokal	Produksi padi naik, tetapi jagung dan hortikultura menurun	Diversifikasi belum optimal, irigasi terbatas
Keterjangkauan	Stabilisasi harga pangan	Harga cabai dan beras fluktuatif	Mekanisme operasi pasar belum efektif
Pemanfaatan	Edukasi gizi seimbang	Sosialisasi gizi terbatas di desa	Kurangnya tenaga penyuluh gizi
Kelembagaan	Koordinasi lintas sektor	Forum pangan daerah belum rutin berjalan	Koordinasi sektoral lemah

2.2. SITUASI SAAT INI

2.2.1. Kondisi Ketersediaan Pangan

Aspek Ketersediaan pangan (food availability) adalah jumlah produksi bahan pangan serealia yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi seperti beras, jagung, ubi, gandum, ketela. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan bahwa jumlah pangan yang dibutuhkan cukup bagi masyarakat baik berupa bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan ternak dan lain-lain (Sumarsono dkk, 2017). Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dalam jumlah yang cukup, aman dikonsumsi, bergizi serta mampu mencukupi kebutuhan kalori tiap individu (Rustanti, 2016).

Ketersediaan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan dengan data produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman sayuran, buah, perikanan dan peternakan serta perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

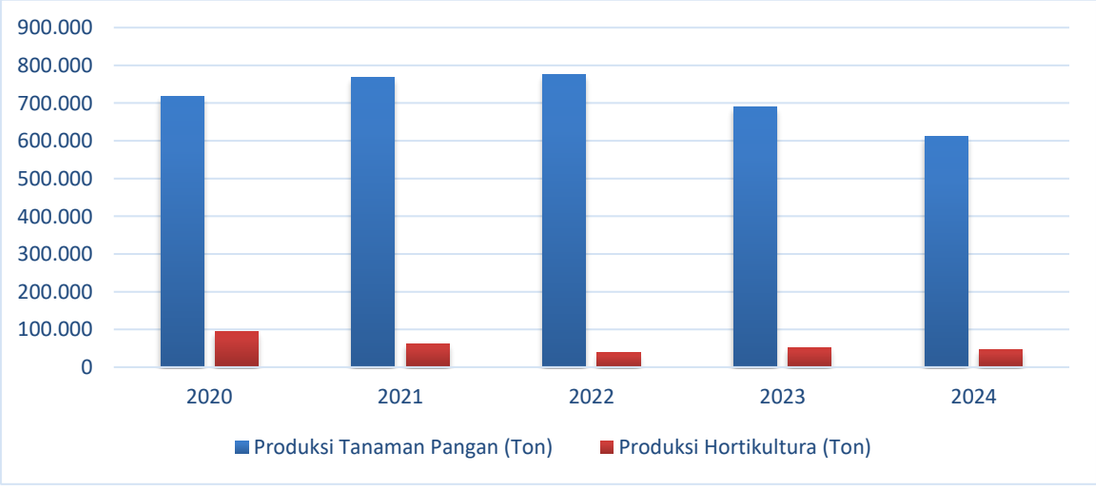

Gambar 2. 1 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki lahan pertanian yang ditanami tanaman pangan seluas 38.555 Ha pada Tahun 2020. Jika ditinjau berdasarkan produktivitasnya, produktivitas tanaman pangan mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022 sedangkan dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2020 sebesar 23,068 ton mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2022, produktivitas tanaman pangan menjadi 27,450 Ton. Sedangkan untuk produktivitas komoditas tanaman holtikultura juga mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Produktivitas tanaman holtikultura pada tahun 2020

sebesar 100,65 ton mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2024, produktivitas tanaman holtikultura menjadi 60,34 Ton.

Tabel 2. 1 Data Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	6.361	6.995	10.255	9.943	7.316
2	Jagung	5.621	1.289	2.747	2.567	2.128
3	Kedelai	0	0	0	0	0
4	Kacang tanah	338	72	49	37	35
5	Ubi kayu	26.159	24.756	26.684	23.320	22.252
6	Ubi Jalar	41	30	22	28	15
7	Kacang Hijau	35	14	100	12	6
Total		**38.555**	**33.156**	**39.857**	**35.907**	**31.752**

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2024

Tabel 2. 2 Data Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	79.945	80.060	80.636	81.703	62.073
2	Jagung	32.582	7.613	15.067	14.080	13.646
3	Kedelai	0	0	0	0	0
4	Kacang tanah	489	99	71	54	53
5	Ubi kayu	603.444	679.552	679.722	594.030	535.189
6	Ubi Jalar	629	566	423	538	305
7	Kacang Hijau	29	15	101	12	7
Total		**717.118**	**767.905**	**776.020**	**690.417**	**611.273**

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2024

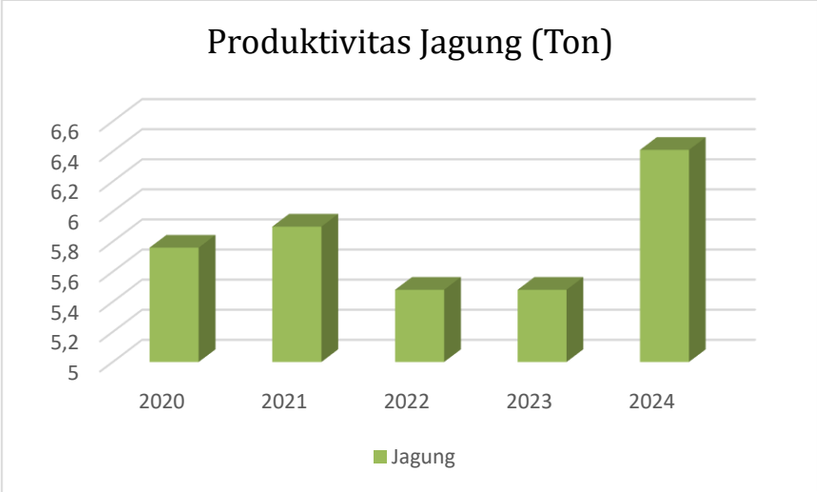
Produktivitas Jagung (Ton)
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
2020
2021
2022
2023
2024
Jagung


Produktivitas Kacang Tanah (Ton)
1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
2020
2021
2022
2023
2024
Kacang Tanah

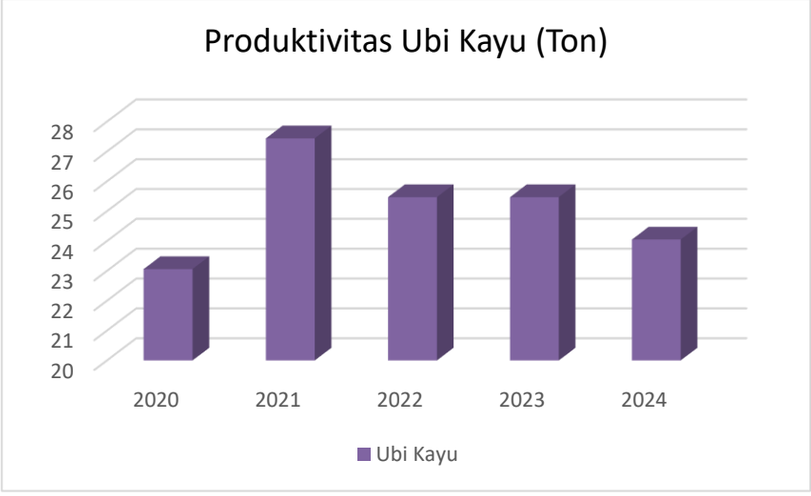
Produktivitas Ubi Kayu (Ton)
28
27
26
25
24
23
22
21
20
2020
2021
2022
2023
2024
Ubi Kayu

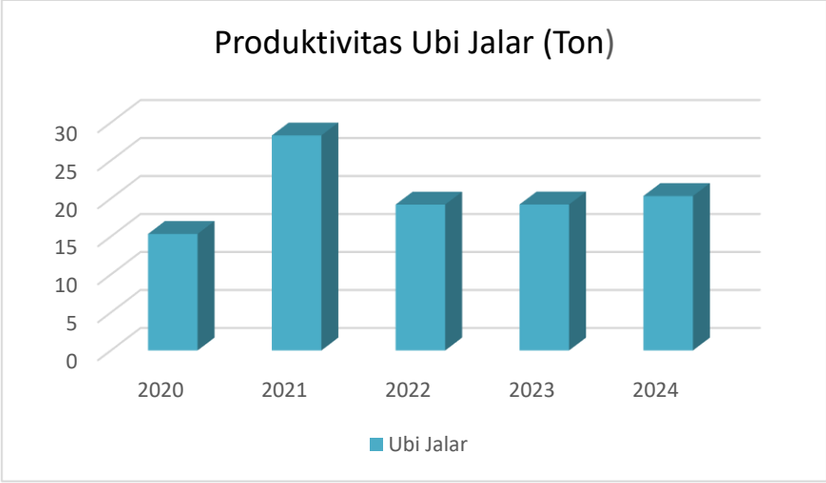

Gambar 2. 3 Grafik Produktivitas Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2020 - 2024

Jika ditinjau berdasarkan produksinya, produksi padi mengalami kondisi fluktuatif ditahun 2020-2023 mengalami kenaikan dan tahun 2023-2024 mengalami penurunan dan jagung mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Produksi jagung pada tahun 2020 sebesar 32.582 ton mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 produksi jagung menjadi 13.646 ton. Untuk produksi komoditas padi, pada tahun 2020 sebesar 79.945 ton mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menjadi 81.703 ton. Penurunan produksi yang terjadi, dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya disebabkankan oleh perubahan faktor cuaca yang berakibat pada kualitas panen. Jika dibandingkan antara produksi dengan produktivitas komoditas pertanian pangan dapat diambil kesimpulan bahwa luasan lahan pertanian tanaman pangan mengalami penurunan.

Tabel 2. 3 Data Luas Panen Tanaman Holtikultura (Ha) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

No	Tanaman Sayur	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang merah	4	2	-	-	-
2	Petsai/Sawi	7	21	28	38	58
3	Kacang Panjang	120	102	86	81	102
4	Cabe Besar	152	119	47	65	31
5	Cabe Rawit	59	54	60	81	65
6	Tomat	21	20	13	22	40
7	Terung	110	107	86	98	117
8	Ketimun	68	57	65	59	90
9	Kangkung	105	104	112	108	129
10	Bayam	144	114	91	90	82
11	Melon	-	2	10	14	16

No	Tanaman Sayur	2020	2021	2022	2023	2024
12	Semangka	138	33	15	35	58
13	Blewah	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2024

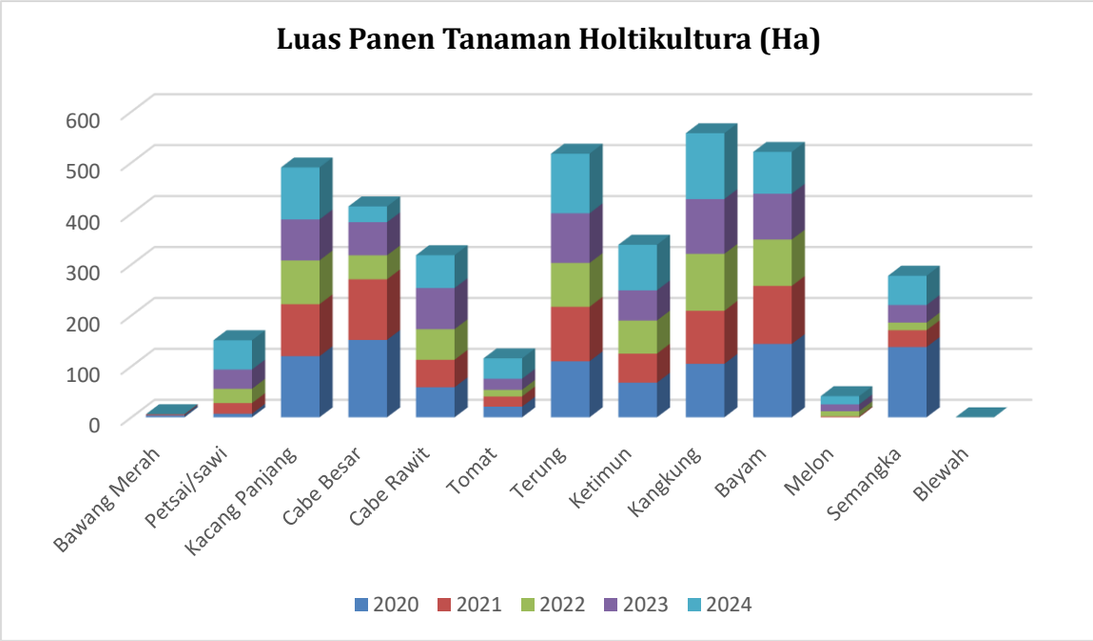

Gambar 2. 4 Grafik Luas Panen Tanaman Holtikultura (Ha) Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2024, lahan panen untuk tanaman sayuran di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, luas lahan panen tanaman sayur sebesar 790 Ha dengan 10 komoditas unggulan yakni kacang panjang, cabai besar, terung, kangkung, bayam, dan semangka. Namun pada tahun 2024, lahan panen tanaman sayur mengalami penurunan sebesar 786,25 Ha.

Tabel 2. 4 Data Produksi Tanaman Holtikultura (Ton) di Kabupaten **Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024**

No	Tanaman Sayur	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang merah	40	263	-	-	-
2	Petsai/Sawi	690	777	541	2.122	1.309
3	Kacang Panjang	8.848	11.435	6.740	7.175	7.091
4	Cabe Besar	13.211	13.836	3.125	5.129	2.103
5	Cabe Rawit	4.149	5.172	4.165	6.131	4.742
6	Tomat	3.698	848	522	1.639	1.586
7	Terung	10.981	8.598	6.096	7.838	9.196
8	Ketimun	6.662	6.308	6.287	7.415	7.784

No	Tanaman Sayur	2020	2021	2022	2023	2024
9	Kangkung	7.226	5.949	5.137	5.900	3.872
10	Bayam	6.020	4.375	3.285	3.011	2.540
11	Melon	-	600	420	807	751
12	Semangka	31.880	3.946	1.601	4.276	6.572
13	Blewah	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2024

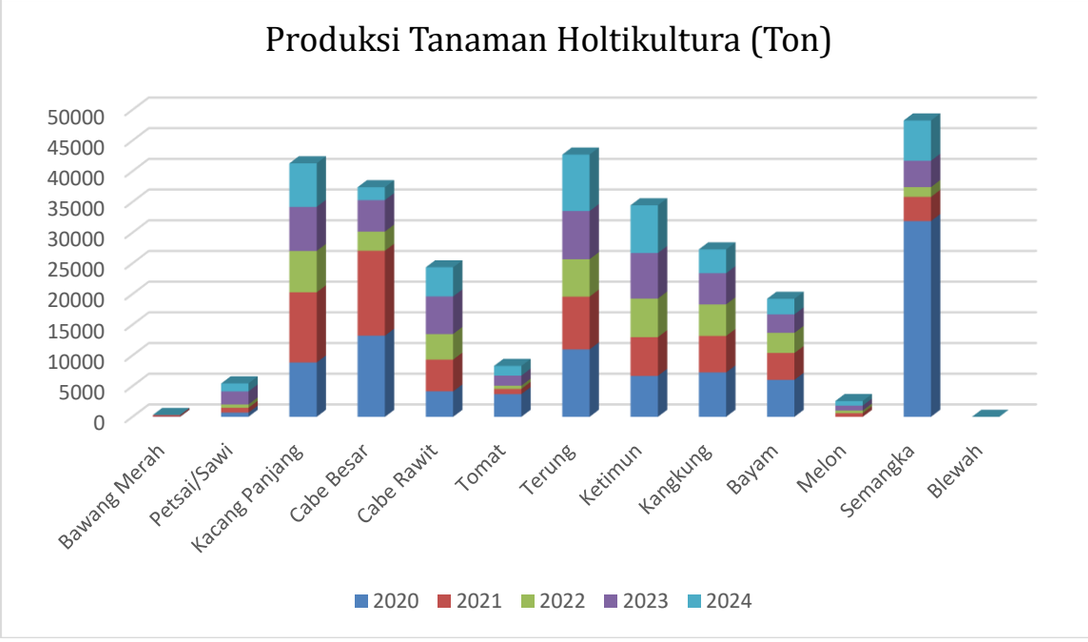

Gambar 2. 5 Grafik Produksi Tanaman Holtikultura (Ton) Tahun 2020-2024

Berdasarkan produksinya, komoditas utama untuk tanaman holtikultura adalah kacang panjang, terung, dan semangka. Produksi cabe besar mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Produksi kacang panjang pada tahun 2020 sebesar 8.848 ton mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021. Untuk produksi komoditas cabe rawit, pada tahun 2020 sebesar 4.149 ton mengalami peningkatan pada tahun 2023 6.131 ton.

Tabel 2. 5 Data Populasi Peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

No	Ternak Besar	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	22.708	26.644	27.310	-	34.419
2	Sapi Perah	2	-	-	-	-
3	Kerbau	850	621	650	372	718
4	Kuda	2	2	2	1	2
5	Kambing	65.352	89.864	92.551	-	164.140

No	Ternak Besar	2020	2021	2022	2023	2024
6	Domba	823	1.010	1.806	220	2.538
7	Ayam Buras	600.000	378.380	582.973	-	705.525
8	Ayam Petelur	-	-	-	-	-
9	Ayam Pedaging	-	-	-	-	-
10	Itik	25.609	3.527	12.272	16.220	12.700
11	Entok	-	-	-	-	-

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2024

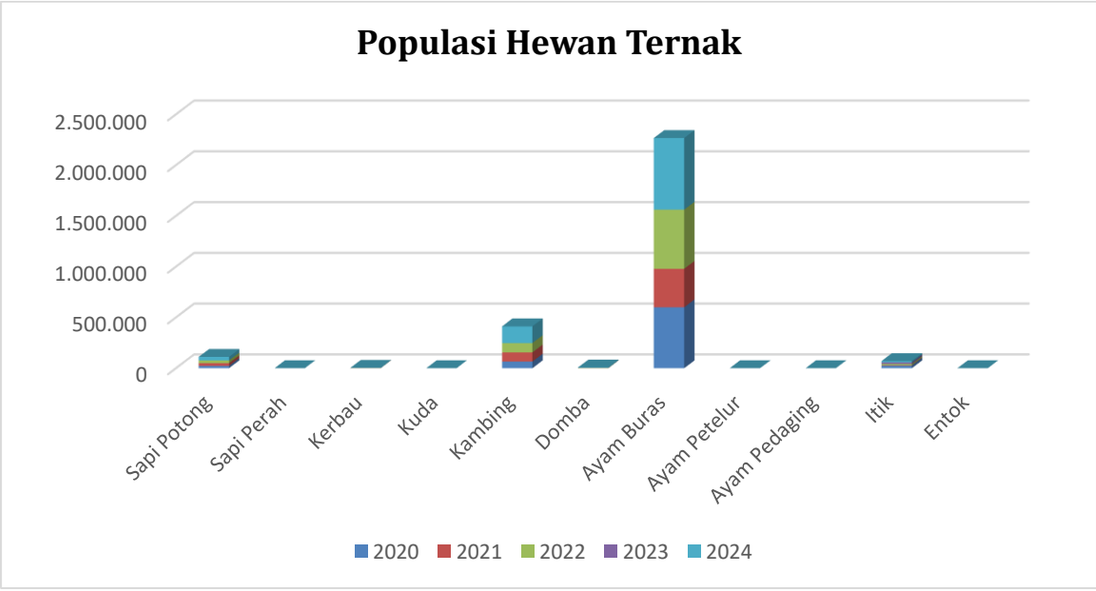

Gambar 2. 6 Grafik Populasi Hewan Ternak Tahun 2023-2024

Tabel 2. 6 Data Pertumbuhan Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2024

No	Jenis Ternak	Produksi Daging (kg)		Pertumbuhan (%)
		2023	2024	
1	Sapi Potong	464.980	517.820	11,37
2	Domba	10.710	11.490	7,28
3	Kambing	197.850	239.650	21,13
4	Ayam Buras	232.023	760.556	227,74
5	Ayam Ras Pedaging	-	-	-
6	Ayam Ras Petelur	84.270	143.640	70,45
7	Itik	3.130	3.510	0,12
8	Puyuh	-	-	-
9	Burung dara	-	-	-
10	Babi	-	-	-
Total Produksi Daging		**992.963**	**1.676.666**	

Tabel 2. 7 Data Pertumbuhan Produksi Hasil Telur di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2024

No	Jenis Ternak	Produksi Telur (kg)		Pertumbuhan (%)
		2023	2024	
1	Ayam Buras	870.143,45	2.852.268,05	227,88
2	Ayam Ras Petelur	-	-	-
3	Burung Puyuh	-	-	-
4	Itik	101.650,54	83.852,20	-17,51
5	Entok	-	-	-
Total Produksi Telur		**971.793,99**	**2.936.118,25**	

Berdasarkan populasinya, komoditas utama untuk hewan ternak adalah ayam buras, ayam ras petelur, kambing, domba, sapi potong dan itik. Populasi hewan ternak mengalami peningkatan dari tahun 2023-2024. Populasi ayam buras pada tahun 2023 sebesar 232.023 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024, populasi ayam ras petelur menjadi 84.270 ekor meningkat pada tahun 2024. Untuk populasi kambing, pada tahun 2023 sebesar 10.710 ekor mengalami peningkatan pada tahun 2024 sampai menjadi 239.650 ekor. Populasi domba pada tahun 2023 sebesar 73.546 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 populasi kambing menjadi 239.650 ekor. Populasi sapi potong pada tahun 2023 sebesar 464.980 ekor mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 populasi sapi potong menjadi 517.820 ekor.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, produksi hasil peternakan tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan baik dari produksi daging dan produksi telur sedangkan produksi susu tidak memproduksi. Pada Tahun 2023, produksi daging sebesar 992.963 kg dan mengalami peningkatan mencapai 1.676.666 kg pada tahun 2024. Untuk produksi telur, pada tahun 2023 sebesar 971.793,99 kg dan mengalami peningkatan mencapai 2.936.118,25 kg pada tahun 2024.

BAB 3 METODE KAJIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mini riset kualitatif dengan menganalisis hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang menjadi variabel dependen adalah kualitas sumber daya manusia, sedangkan yang menjadi variabel independennya adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

3.2. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu variabel yang satu dengan yang lain dapat dihubungkan sehingga dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat atau perseorangan yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, meratadan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan danbudaya masyarakat. Indeks Pembangunan Masyarakat adalah tercapainya tujuan pembangunan manusia dilihat dari status gizi masyarakat dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama dalam waktu 2 bulan 1 Juni sd 31 Juli 2025

C. Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan Komputer/Laptop pengolah data Microsoft Exceel 2020, SPSS, Smart PLS dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian adalah sekumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang terkait dengan kondisi masing-masing subsistem Ketahanan Pangan.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitaif yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari website-website resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian dan data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan data primer dari masyarakat

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menghimpun data sekunder yang telah dipublikasi, yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. Dan mengambil data secara langsung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Ini bermakna bahwa prosedur pengungkapan data dan fakta yang peneliti gunakan adalah dengan cara nonstatistik atau nonmatematis (Moleong, 2016). Data kualitatif adalah dokumen pribadi, catatan lapangan,ucapan dan tindakan responden dan dokumen pendukung. Dengan demikian, metode penelitian ini hasilnya akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai hasil yang didapat dalam penelitian dengan diukur berdasarkan kualitasnya. Sumber data pada penelitian ini adalah didapat dari beberapa narasumber.

Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi poenelitian atau subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data kedua dari data yang dibutuhkan peneliti.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi,teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

3.6. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahap I : Pemilihan indikator pengukur subsistem Ketahanan Pangan

Tahap II : Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tahap III : Perancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Spesifik Ketahanan Pangan

Tahap IV : Analisa Kondisi Ketahanan Pangan menggunakan software

Tahap V : Penyusunan Rekomendasi tentang metode perencanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Ketahanan Pangan

3.7. Tahapan Analisis Data

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka prosedur penelitian sebagai berikut:

A. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskripsif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perkembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung tentang kebijakan ketahanan pangan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029.

BAB 4
PELAKSANAAN PANGAN DAN GIZI

4.1 Pendekatan Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada 4 Pilar Strategi Nasional Pangan dan Gizi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan: Fokus pada peningkatan produksi pangan lokal berbasis potensi wilayah seperti padi, jagung, dan ikan air tawar melalui intensifikasi/ekstensifikasi serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
2. Akses Pangan: Memperluas akses masyarakat terhadap pangan melalui perbaikan jaringan distribusi hingga desa terpencil, pemanfaatan BUMDes/koperasi, dan perbaikan sarpras logistik.
3. Pemanfaatan Pangan: Meningkatkan pemanfaatan pangan melalui edukasi gizi, pengembangan menu pangan lokal bergizi seimbang, serta peningkatan kualitas kantin sekolah sehat.
4. Stabilitas Pangan: Menjamin stabilitas ketersediaan dan harga pangan melalui cadangan pangan daerah, sistem distribusi cepat saat bencana, dan penguatan sistem peringatan dini kerawanan pangan.

4.2 Isu Strategis Tambahan

- Kesetaraan Gender: Mendorong peran perempuan dalam UMKM pangan, produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan.
- UMKM Pangan: Dukungan pembiayaan, akses pasar, sertifikasi halal, dan perbaikan kemasan/label gizi.
- Logistik Pangan: Penguatan rantai dingin (cold chain) untuk komoditas ikan, daging, dan sayuran segar.
- Respon Darurat: Penguatan kapasitas penanganan pangan pada situasi bencana (banjir/kekeringan) termasuk skema bantuan pangan segera.

4.3 Matriks Tujuan Strategis – Strategi – Aksi – Indikator – OPD Penanggung Jawab – Sumber Pendanaan

Tujuan Strategis	Strategi	Aksi	Indikator	OPD Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
Meningkatkan ketersediaan pangan lokal	Optimalisasi produksi pertanian & perikanan	Pengembangan demplot padi & jagung unggul	Luas lahan dengan varietas unggul (Ha)	Dinas Pertanian	APBD, Dana Desa
		Peningkatan produksi ikan air tawar	Jumlah kolam & produksi ikan (Ton)	Dinas Perikanan	APBD, APBN
Memperluas akses pangan masyarakat	Perbaikan jaringan distribusi pangan	Pendirian unit distribusi pangan di BUMDes	Jumlah desa memiliki unit distribusi pangan	Dinas Koperasi & UMKM	APBD, APBN
		Pembangunan gudang & pasar desa	Jumlah gudang & pasar aktif	Dinas Perdagangan	APBD
Memperkuat pemanfaatan pangan bergizi	Edukasi gizi berbasis sekolah/keluarga	Program kantin sehat di sekolah	Jumlah sekolah dengan kantin sehat	Dinas Pendidikan	APBD
		Penyuluhan gizi bagi keluarga	Jumlah keluarga teredukasi	Dinas Kesehatan	APBD, DAK
Menjaga stabilitas pangan	Cadangan pangan daerah & respons cepat	Penguatan gudang pangan & distribusi cepat	Jumlah gudang aktif & waktu distribusi (hari)	Dinas Ketahanan Pangan	APBD, CSR
	Sistem peringatan dini kerawanan pangan	Pengembangan sistem pemantauan terintegrasi	Jumlah desa terpantau	Dinas Ketahanan Pangan	APBD
Mendorong kesetaraan gender di sektor pangan	Pemberdayaan perempuan dalam UMKM pangan	Pelatihan wirausaha pangan bagi perempuan	Jumlah pelaku UMKM perempuan dilatih	Dinas Koperasi & UMKM	APBD, Dana Desa
Penguatan UMKM pangan lokal	Fasilitasi sertifikasi halal & kemasan	Pendampingan & sertifikasi halal produk	Jumlah UMKM tersertifikasi	Dinas Perindustrian & Perdagangan	APBD, APBN
Penguatan logistik pangan	Pembangunan cold storage & transportasi rantai dingin	Pembangunan/operasional cold storage	Jumlah cold storage beroperasi	Dinas Perdagangan	APBD, CSR
Peningkatan respons darurat pangan	Distribusi pangan darurat saat bencana	Penyaluran paket pangan darurat	Jumlah paket disalurkan	BPBD, Dinas Sosial	APBD, BNPB

4.4 Aksi Tambahan untuk Mengisi Gap

1. Pendirian Bank Pangan Desa untuk menampung surplus produksi & mengurangi kerugian pascapanen.
2. Pelatihan pengolahan pangan lokal menjadi produk siap jual untuk peningkatan nilai tambah.
3. Pengembangan Rumah Pangan Lestari berbasis pekarangan rumah tangga.
4. Digitalisasi Pasar Pangan melalui platform e-commerce lokal.

4.5 Kondisi Geografi

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kabupaten baru , pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang, terletak ditengah Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang bawang Barat terdiri dari 9 Kecamatan, dan 100 tiyuh (desa) dan 3 kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah mencapai 1.257,099 km2 atau setara dengan 125.709ha, dengan Ibukota Kabupaten Panaragan, di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang terdiri dari lahan basah, lahan kering dan pemukiman dengan jumlah penduduk sekitar 268.119 jiwa yang merupakan potensi sumber dayamanusia yang cukup potensial, disamping potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, melimpah, dan prospektif terutama dalam bidang Perkebunan, Pertambangan, Pertanian danAgrobisnis lainnya.

Kondisi Geografis Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km2 atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km2 atau setara dengan 125.708,76 Ha. Bila dilihat dari luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, terkecil 72,16 km2 di Kecamatan Gunung Terang dan terluas 247,47 km2 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan Kab. Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Tiyuh dan Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	
				(Ha)	(%)
1	Tulang Bawang Udik	13	Karta	21.369,69	16,999
2	Tumijajar	10	Dayamurni	11.322,43	9,007
3	Tulang Bawang Tengah	21	Panarangan	24.746,94	19,686
4	Pagar Dewa	6	Pagar Dewa	13.929,28	11,081
5	Lambu Kibang	10	Kibang Budi Jaya	8.482,24	6,748
6	Gunung Terang	10	Gunung Terang	7.216,48	5,741
7	Batu Putih	10	Margo Mulya	10.083,71	8,021
8	Gunung Agung	13	Tunas Jaya	21.188,62	16,855
9	Way Kenanga	10	Balam Jaya	7.369,38	5,862
Total		**103**		**125.708,76**	**100,00**

Aspek Demografi Pembangunan dalam paradigma baru tidak hanyamenekankan pada pembangunan fisik namun juga Pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Disisi lain SDM di Indonesia memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Karakter dan sifat SDM banyak dipengaruhi dengan letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, suku, agama/kepercayaan, maupun faktor lingkungan lainnya. Kependudukan atau masyarakat merupakan subjek utama pembangunan karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Besar kecilnya, komposisi, kualitas dan persebaran penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang pesat namun kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan berkorelasi dan berinteraksi dengan kondisi demografi saat ini, karena informasi demografi menempati posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan SDM seharusnya lebih inovatif dan variatif mencakup seluruh aspek mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk.

Provinsi Lampung dalam beberapa terkhusus demografis memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Provinsi Lampung dalam kaitan demografis merupakan miniatur Indonesia dimana berbagai macam suku

budaya serta agama ada di Provinsi ini. Terkhusus Kabupaten Tulang Bawang Barat, masyarakat adat masih terdapat dibeberapa wilayah permukiman. Selain itu pertumbuhan penduduk alami (fertilitas), migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar (positif net migrasi), sehingga mengakibatkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkembang dan hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik yang tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maupun masyarakat yang tinggal di luar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 5 tahun teakhir (2020–2024) mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2020-2024 yakni sebesar 1,173%. Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut menunjukkan potensi produktivitas tenaga kerja masih cukup besar. Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2024 masih menempati peringkat 4 terendah jumlah penduduk di Provinsi Lampung setelah Kota Metro, kabupaten Pesisir Barat, dan Mesuji. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1	2020	146.355	139.807	286.162	104,68	1,33
2	2021	147.052	140.655	287.707	104,55	0,72
3	2022	147.936	141.684	289.620	104,41	0,66
4	2023	150.600	144.881	295.481	103,95	1,98
5	2024	152.054	146.642	298.700	103,69	1,17

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 – 2024 berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan jumlah penduduk yang berdasarkan dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat per-semester 2 (dua) atau diakhir tahun 2024 tercatat

sebanyak 312.516 jiwa dengan jumlah laki – laki sebanyak 159.586 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 152.930 jiwa.

B. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masing-masing 89.693 dan 45.961 jiwa. Kedua kecamatan tersebut selama ini memang telah menjadi pusat perekonomian dari Kabupaten tulang Bawang Barat. Dalam hal kepadatan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masih menjadi kecamatan dengan rasio kepadatan tertinggi. Kepadatan terendah berada di daerah Kecamatan Pagar Dewa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 mencapai 246 jiwa/km2. Kepadatan penduduk menunjukkan rasiojumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dengan luas wilayah yang didiami. Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin banyak orang yang mendiami wilayah tersebut. Data distribusi dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/KM²
1	Tulang Bawang Udik	34.290	11,48	160,46
2	Tumijajar	45.961	15,39	405,93
3	Tulang Bawang Tengah	89.693	30,03	364,44
4	Pagar Dewa	7.080	2.97	50.83
5	Lambu Kibang	24.500	8.2	288,84
6	Gunung Terang	20.187	6,76	279,73
7	Batu Putih	17.763	5,95	176,16
8	Gunung Agung	34.954	11,7	164,97
9	Way Kenanga	24.268	8,12	329,31
Tulang Bawang Barat		**298.696**	**100**	**246.52**

4.6 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi

Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi memiliki posisi yang strategis didalam pembangunan pangan dan gizi. Rencana Aksi Daerah Pangan Gizimenjadi pedoman bagi Organisas Perangkat Daerah (OPD) untukmenentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizikepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi ini akan digunakan sebagaidokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaanpembangunan pangan dan gizi di daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dankegiatan yang sudah ada serta mengisi gap program dan kegiatan yang belumterakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalandengan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Tahun 2021-2024 dan RPJMD. Dengan demikian kedudukan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi akanmenjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu programdan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukungoleh pendanaan yang memadai

Pelaksanaan Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemia (perguruan tinggi/ organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1) Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan.

2) Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupunjenis kegiatan.Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan denganprioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
3) Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, danberbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektornamun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusundokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasikegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagimengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumenperencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepattercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.

a. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Penyusunan Rencana aksi pangan dan gizi diperlukan pada awalkegiatan Rencana aksi pangan dan gizi, oleh karena itu perlu disusunlangkah-langkah teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya.Langkah-langkah teknis terdiri dari 11 (sebelas) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali.Adapunlangkah-langkah teknis dimaksud dapat dilihat dalam TabeI berikut ini.

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan
Langkah 1	Pengarahan penyusunan rencana aksa pangan dan gizi	Kesepakatan terkait kerangka penulisan, pengorganisasian/tata kelola dan *timeline*	*Timeline* kerja; kerangka penulisan; pemetaan pemangku kepentingan yang akan terlibat; rencana pengorganisasian
Langkah 2	Pembahasan Teknis penyusunan Rencana aksi pangan dan gizi·	Mekanisme dan tahapan penyusunan RAD-PG Pemetaan Pemangku Kepentingan· Pengorganisasian penyusundanpembagian kerja SK forum Koordinasi	Pedoman Penyusunan Rencana aksi pangan dan gizi
Langkah 3	Penyusunan rencana aksi oleh masing-masing Analisis situasi OPD:	Capaian dan tantangan instansi terhadap bidang pangan dan gizi. Apabila memungkinkan, analisis situasi menggambarkan data terpilah (laki-laki dan perempuan) sesuai ketersediaan data didaerah	Data capaian instansi terkait kegiatan bidang pangandan gizi di tahun-tahun sebelumnya
		Matriks berisi strategi; aksi; indikator; target, alokasi anggaran (indikatif) (lihat lampiran1)	RAN-PG, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD; Renaksi lain yang relevan seperti RAD-TPB,dll
Langkah 4	Mendiskusikan rencana aksi pada masing-masing poka tujuan strategis	Analisis situasi bersama, terkait outcome Rencana aksi pangan dan gizi seperti (Skor PPH, stunting, wasting, obesitas dll). Bila memungkinkan meganalisis juga data terkait POU dan FIES. Termasuk analisis trend/proyeksi	Data mengeai situasi pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan)
		Narasi dan matriks berisi strategi, aksi, indikator, target, alokasi anggaran masing masing Pokja	Rencana aksi pangan dan gizi, RPJMD, RKPD, Renstra-OPD, Renja-OPD, RKA-OPD, lokasi dan sasaran prioritas (apabila diperlukan): renaksi lain yang rrelevan seperti RAD-TPB, dll
		Draft awal rencana aksi pangan dan gizi berisi narasi dan matriks aksi dari seluruh Prokja	
Langkah 5	Pembahasan rancangan rancangan aksi pangan dan gizi	Kompilasi narasi dan matriks aksi rencana aksi pangan dann gizi serta masukan untuk penyempurnaan drafft awal rencana aksi pangan dan gizi	Draft awal rencana aksi pangan dan gizi berisi arasi dan matriks aksi masing masing pokj
Lagkah 6	Konsultasi publik	Draft awal rencana aksi pangan dan gizi yang disempurnakan dan telah mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan	Komplikasi narasi danmatriks aksi rencana aksi pangan dan gizi, serta masukan untuk penyempurnaan draft awal rencana aksi pangan dan gizi

Langkah	Kegiatan	Output	Materi yang disiapkan
Langkah 7	Finalisasi rancangan rencana aksi pangan dan gizi berdasarkan masukan dan hasil konsultasi publik	Draft final yang siap di review	Draft awal rencana aksi pangan dan gizi yang disempurnakan dan telah mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan
Langkah 8	Review rancangan akhir rencana aksi pangan dan gizi	Masukan untuk penyempurnaan draft akhir untuk penetapan kedalam peraturan kepala daerah Rencana aksi pangan dan gizi Kabupaten/Kota di review oleh forum penyusunan di Provinsi di review oleh pusat	Draft pre-final rencana aksi pangan dan gizi (90-95% kesiapan dokumen); ceklis review dokumn ; surat permohonan review
Langkah 9	Pengajuan rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana aksi pangan dan gizi Menyempurnakan rancangan akhir rencana aksi pangan dan gizi berdasrkan hasil review	Peraturan kepala daerah tentang rencana aksi pangan dan gizi Keterangan; Rancangan pertauran Bupati/Wali kota diajukan ke Provinsi Draft final rencana aksi pangan dan gizi	Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur rencana aksi pandangan gizi; peraturan daerah terkait penetapan RAD-PG periode sebe;lumnya (jika ada) Draft pre-final rencana aksi pangan dan gizi (90-95% kesiapan dokumen)
Langkah 10	Mengesahkan rencana aksi oangan dan gizi kedalam peraturan kepala daerah	Peraturan kepala daerah tentang rencana aksi pangan dan gizi	Rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana aksi pangan dan gizi.
Langkah 11	Mensosialisasikan RAD-PPG kepada seluru pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten	Komitmen masing masing OPD untuk implementasi aksi	Peraturan kepala daerah tentang RAD-PG yang sudah ditetapkan; RAN-PG yang sudah ditetapkan

b. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dan Strategi Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Rencana aksi pangan dan gizi disusun untuk mendukung pencapaiantarget pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.4 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di pusat yang Dapat Diacu oleh Pemerintah Daerah

N	Indikator	Baseline	Target
Intermediate Outcome			
1	Ketersediaan beras (jutaton)	38,4	46,8
2	Ketersediaan protein hewani (jutaton)	2,4	2,9
3	Peningkatan produksi buah-buahan (%)	3,5	5,7
4	Peningkatan produksi sayuran (%)	2,5	3,1
5	Skor pola pangan harapan	86,4[b)]	95,2
6	Angka kecukupan energi (AKA)(kkal/kapita/hari)	2,121[b)]	2,100
7	Angka kecukupan protein (AKP)(gram/kapita/hari)	62,9[b)]	57
8	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevelence of undermourishment*/PoU)	6,7[b)]	5
9	Prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES)	5,8[b)]	4
10	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,7[c)]	62
11	Konsumsi	13,2[b)]	14,6
12	Konsumsi protein asal ternak(gram/kapita/hari)	10,9[b)]	11
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	244,3[b)]	316,3
14	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 [ab)]	85-95
15	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	48 ton **)	100% Penerima BPNT
16	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM,2019)	86
	Outcome		
1	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB,2019)	14
2	Prefelensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
3	Prevelensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Indikator kinerja utama di bidang pangan dan gizi seperti pada Tabel 4.4 telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dapat diacu daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Untuk mencapainya, pemerintah daerah juga dapat mengacu pada Rencana aksi pangan dan gizi 2021-2024

dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta.kebutuhan daerah masing-masing, sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbangdan aman, dengan strategi sebagai berikut:
   a) Peningkatan produksi pangan yang beragam;
   b) Penyediaan pangan yang aman (dalam prosesproduksi);
   c) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah(daerah,dan masyarakat;
   d) Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen(food loss);
   e) Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui bio-fortifikasi
2. Peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
   a) Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
   b) Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;
   c) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi,dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
   d) Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan denganpemanfaatan jenis pangan yang beragam;
   e) Penyediaaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
   f) Penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerahrentan rawan pangan dan terdampak bencana; danPengembangan sistem logistik pangan
3. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial), denganstrategi sebagai berikut:
   a) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
   b) Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiaptahun;
   c) Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimnbang, dan aman sejak usia dini;
   d) Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan(pdan mutu Pangan;
   e) Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineralbersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi padasasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita(dibawah lima tahun)dan kelompok rentan rawan Pangan;

f) Pemberian Air Susu lbu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan pemanfaatan Makanan PendampingAir Susu Ibu (MP-ASI)berbasis Pangan lokal;
g) Peningkatan layanan kesehatan dan gizimasyarakat;
h) Pengendalian pemborosan Pangan (food waste);
i) Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi;dan
j) Peningkatan jaminan keamanan dan mutu Pangan.

4. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi
   a) Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dan gizi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,dan desa/kelurahan;
   b) Penguatan kemitraan antar pemangku kepentingan;
   c) Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dangizi;dan
   d) Penguatan dukungan riset dan inovasi untuk keta hanan pangandan gizi.

Strategi ketahanan pangan dan gizi di atas diharapkan mampu dijabarkan oleh pemerintah daerah sebagai referensi aksi dan tidak bersifat mutlak diacu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

c. Indikator yang perlu di Pantau dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi Perbaikan Gizi Masyarakat

Tabel 4.5 Indikator Perbaikan Gizi Masyarakat dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	ODP penanggungg jawab
1	Persentase balita gizi buruk	Dinas Kesehatan
2	Prevalensi wasting pada anak balita (%)	Dinas Kesehatan
3	Prevaleni berat badan lebih dan obesitas penduduk usia >18thn (%)	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu hamil KEK mendapatPMT (%)	Dinas Kesehatan
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)	Dinas Kesehatan
6	Persentase bayi kurus yang mendapat makanan tambahan (%)	Dinas Kesehatan
7	Persentase bayi baru lahir mendapat siasi menyusui dini (IMD) (%)	Dinas Kesehatan
8	Prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 28%	Dinas Kesehatan
9	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)(%)	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)	Dinas Kesehatan
11	Prevalensi pendek sangat pendek	Dinas Kesehatan

No	Indikator	ODP penanggungg jawab
	(stunting) pada anak balita (bayi dibawah 2btahun) (%)	
12	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Dinas Kesehatan
13	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium (%)	Dinas Kesehatan
14	Persentase remaja puteri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)(%)	Dinas Kesehatan
15	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Dinas Kesehatan
16	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif (%)	Dinas Kesehatan
17	Persentase bayi usia 6 bulan mendaptkan ASI Ekslusif	Dinas Kesehatan
18	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
19	Cakupan kunjungan bayi	Dinas Kesehatan
20	Angka kematian bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidupPersentase puskesmas yang melaksanakan penjaring kesehatan untuk peserta didik kelas 1,7 dan 10 (%)	Dinas Kesehatan
21	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)	Dinas Kesehatan
22	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	Dinas Kesehatan
23	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (Indikator sama pembinaan pelayanan kesehatan ibu)(%)	Dinas Kesehatan
24	Persentase Puskesmas program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)(%)	Dinas Kesehatan
25	Persentase puskemas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	Dinas Kesehatan

Aksesibiltas Pangan Beragam

1) Produksi Bahan Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

a) Produksi Tanaman Pangan (Padi, Palawija, Sayuran)

Pada tahun 2021 produksi padi sebesar 80.060 Ton, naik menjadi 62.073 Ton pada tahun 2024. Produksi padi paling tinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 62.073 Ton. Sementara untuk produksi jagung pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan dari 7.613 Ton menjadi 15.067 dan ditahun 2022-2024 mengalami penurunan. Kondisi peningkatan terjadi pada produksi ubi kayu mengalami kenaikan pada tahun 2021-2023, ubi jalar mengalami kondisi fluktuatif, cabai merah pada tahun 2021 ke tahun

2022 mengalami kenaikan dan ditahun 2022-2024 mengalami penurunan. Sementara untuk komoditas cabe rawit trennya mengalami kondisi yang fluktuatif. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Produksi Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024

No	Jenis Komoditas	2021	2022	2023	2024
1	Padi				
	Produksi (Ton)	80.060	80.636	81.703	62.073
2	Palawija				
	1) Jagung Produksi (Ton)	7.613	15.067	14.080	13.646
	2) Ubi kayu Produksi (Ton)	679.552	679.722	594.030	535.189
	3) Ubi Jalar Produksi (Ton)	566	423	538	305
3	Sayuran				
	1) Cabe merah Produksi (Ton)	800	8.279	7.526	6.024
	2) Cabe rawit Produksi (Ton)	5.172	4.165	6.131	4.742

b) Produksi Tanaman Buah-Buahan

Beberapa komoditas buah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah alpukat, belimbing, jambu air, jambu biji, manga, jeruk, papaya, pisang, rambutan, salak, sawo. Tanaman buah yang memiliki produksi buah paling tinggi ditahun 2023 adalah mangga dan paling tinggi ditahun 2024 adalah pisang, sedangkan produksi buah yang paling rendah ditahun 2023 dan 2024 adalah sawo. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Jenis dan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2024

No	Jenis Komoditas	2023	2024
1.	Alpukat		
	Produksi (Ku)	4.804,13	5.156,73
2.	Belimbing		
	Produksi (Ku)	1.506,37	1.258,05
3.	Jambu Air		
	Produksi (Ku)	5.709,22	5.286,90
4.	Jambu Biji		
	Produksi (Ku)	4.770,83	3.810,64
5.	Mangga		
	Produksi (Ku)	25.693,42	19.262,00
6.	Jeruk Siam/Keprok		
	Produksi (Ku)	3.274,12	3.393,34
7.	Pepaya		

No	Jenis Komoditas	2023	2024
	Produksi (Ku)	8.496,30	13.042,69
8.	Pisang		
	Produksi (Ku)	21.806,50	23.801,07
9.	Rambutan		
	Produksi (Ku)	5.983,60	7.253,00
10.	Salak		
	Produksi (Ku)	18,34	100,52
11.	Sawo		
	Produksi (Ku)	2.440,00	2.138,20

c) Produksi Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah ternak besar, yaitu sapi potong dan kerbau, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan babi. Populasi ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat kondisinya fluktuatif dengan tren kenaikan pada sapi potong, kerbau, domba, kambing dan tren menurun pada babi.

Tabel 4.8 Banyaknya ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi potong	22.708	26.644	27.310	23.075	34.419
2.	Kerbau	850	621	650	372	718
3.	Kambing	65.352	89.864	92.551	158.999	164.140
4.	Domba	823	1010	1.806	220	2.538
5.	Babi	1.258	1.258	611	461	1.288

Sedangkan untuk produksi ternak unggas, di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik dan Itik Manila mengalami fluktuatif.

Tabel 4.9 Produksi Unggas di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024

No	Jenis Komoditas (ekor)	2021	2022	2023	2024
1.	Ayam kampung	326.974	402.973	671.926	705.525
2.	Ayam petelur	55.450	103.079	112.800	239.393
3.	Ayam pedaging	333.000	1.178.000	1.238.000	1.299.900
4.	Itik dan Itik manila	2.619	12.721	7.896	12.700

Produksi hasil peternakan dalam tahun 2021-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan tren kenaikan pada daging dan telur. Produksi daging (sapi, kambing, domba, babi, ayam ras, dan ayam buras)

semuanya mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 392,59 menjadi 912,90 pada tahun 2024 dan produksi telur juga mengalami kenaikan dari 2,21 pada tahun 2021 menjadi 2936,12 ditahun 2024.

Tabel 4.10 Jenis dan Produksi daging, telur, dan Susu di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021-2024.

No	Daging, Telur, Susu, Kulit	2021	2022	2023	2024
1.	Daging (ton)	392,59	626,15	909,54	912,90
2.	Telur (ton)	2,21	2,274	2,36	2936,12
3.	Susu (Liter)	-	-	-	-
4.	Kulit (ton)	-	-	-	-

d) Produksi Perikanan

Komoditi perikanan andalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah perairan umum. Terjadi tren meningkat pada perairan umum yaitu tahun 2021 sekitar 624,2 ton menjadi 629,50 ton pada tahun 2024. Pada perikanan laut tidak mengalami tren meningkat atau menurun.

Tabel 4.11 Perkembangan Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024.

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perikanan Laut (Ton)	-	-	-	-	-
2.	Peraian Umum (Ton)	-	624,2	-	626,29	629,50

Kabupaten	Telur ayam ras	Telur ayam kampung	Telur itik/telur itikmanila	Telur lainnya (telur puyuh, telur asin mentah	Susu lainnya dan susu hasil lain dari susu
Tulang Bawang Barat	1,737	0,044	-	0,073	0,001

2) Banyaknya Ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021-2024.

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah ternak besar,yaitu sapi, kerbau dan kuda, sedangkan ternak kecil

terdiri dari kambing dan domba. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam dan itik). Populasi ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat kondisinya fluktuatif, dengan tren naik dan turun. Populasi sapi yang semula 9.525 ekor pada 2021 naik menjadi 34.419 ekor di tahun 2024. Kerbau yang semula 27 ekor naik menjadi 718 ekor pada tahun 2024. Populasi kuda turun yang semulanya 6 ekor menjadi 2 ekor ditahun 2024. Populasi kambing dari semula 43.769 pada 2021 naik menjadi 164.140 ekor di tahun 2024, dan terakhir domba dari semula 512 ekor naik menjadi 2.538 ekor pada tahun 2024.

4.12 Banyaknya ternak di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021-2024

Jenis Ternak	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Sapi	9.525	9.584	23.075	34.419
Kerbau	27	30	372	718
Kuda	6	3	1	2
Kambing	43.769	44.251	158.999	164.140
Domba	512	548	220	2.538

3) Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2022

Produksi hasil peternakan dalam 5 tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan tren kenaikan di hampir semua hasil ternak kecuali produksi babi. Produksi daging (sapi, kambing, domba, ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging) semuanya mengalami kenaikan. Sedangkan pada produksi babi terjadi penurunan produksi yang cukup drastis dari tahun 2021-2024. Sedangkan untuk produksi telur, terjadi kenaikan di semua jenis telur mulai dari telur ayam ras, ayam buras, dan itik.

4. Perikanan

Komoditi perikanan budidaya yang menjadi andalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dari hasil budidaya perikanan kolam, dengan total produksi tertinggi menjapai 4492 ton pada tahun 2024. Peringkat kedua diduduki oleh produksi perikanan kerambah, yang terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan secara umum produksi budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak tahun 2019-2024 mengalami tren meningkat. Paling tinggi produksi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 129 ton.

Tabel 4.13 Produksi Perikanan tahun 2019-2024

Produksi perikanan (ton)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan laut	-	-	-	-	-	-
Tambak	-	-	-	-	-	-
Kolam	3514	3549	3618	3862	4291	4492
Kerambah	15	18	20	23	23	129

Analisis Deskripsi Data

A. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama,penganekaragaman horizontal, yaitu upaya untuk menganekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; kedua upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan pola pagan harapan ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Skor pola pangan harapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren yang positif karena selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2021 tercatat skor pola pangan haran sebesar 89,7, naik menjadi 90,7 pada tahun 2022. Dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, skor pola pangan harapan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah capaian provinsi.

B. Status Gizi

Gizi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangandan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi adalah zat atau senyawa yang

terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Menurut Dewa dkk Menjelaskan bahwa gizi adalah suatu proses organisme yang menggunakan makanan yang dimakan atau dikonsumsi secara normal melalui tahapan proses degesti, absorpsi, dan transportasi.

Penyimpanan, metabolisme serta pengeluaran zat yang dianggap tidak digunakan untuk dapat mempertahankan kehidupan, pertumbuhan,dan fungsi normal dari semua organ-organ serta menghasilkan energi. Status gizi yang baik untuk membangun sumber daya berkualitas padahal kekatnya harus dimulai sedini mungkin, yakni sejak manusia itu masih berada dalam kandungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah makanannya. Melalui makanan manusia mendapat zat gizi yang merupakan kebutuhan dasar untuk hidup dan berkembang. Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Untuk itu program perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat.

C. Peran dan Dampak Pangan dan Gizi dalam Pembangunan

Membangun sumber daya masyarakat seutuhnya berarti menjamin adanya peningkatan taraf hidup rakyat dari semua lapisan masyarakat dan golongan. Peningkatan taraf hidup rakyat tercermin pada kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Kemajuan usaha pemenuhan kebutuhan pokok akan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan. Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, usaha-usaha peningkatan gizi terutama harus ditunjukkan pada anak-anak dan ibu hamil. Karena pada masa yang akan datang anak-anak merupakan generasi penerus nusa dan bangsa.

Penundaan pemberian perhatian pemeliharaan gizi yang tepat pada anak-anak akan menurunkan potensi sebagai sumber daya manusia pembangunan masyarakat dan ekonomi nasional. Berbagai alasan mengapa anak-anak memerlukan penanganan serius terutama jaminan ketersediaan zat gizi, yaitu:

a) Kekurangan Gizi adalah penyebab utama kematian bayi dan anak-anak.Hal ini berarti berkurangnya kuantitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

b) Kekurangan Gizi berakibat meningkatkan angka kesakitan dan menurunnya produktifitas kerja manusia. Hal ini berarti dapat menambah beban pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
c) Kekurangan Gizi berakibat menurunnya kecerdasan anak-anak. Hal ini berarti menurunnya kualitas kecerdasan manusia pandai yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa.
d) Kurangnya Gizi berakibat menurunnya daya tahan manusia untuk bekerja, yang berarti menurunnya prestasi dan produktivitas kerja manusia.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Rencana aksi daerah pangan gizi selain berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multi sektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan rencana aksi daerah pangan gizi memerlukan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah terkait. Penyusunan akan diawali dengan pembentukan forum koordinasi yaitu forum pengarah dan forum teknis.

Amanat UU Pangan untuk menyusun rencana aksi daerah pangangizi dapat diselaraskan pelaksanaan kegiatannya terhadap aksi konvergensi penurunan stunting sehingga pemerintah daerah tidak perlu menyusun rencana aksi daerah khusus untuk penurunan stunting hingga terbit peraturan perundang-undangan yang sah yang mengatur tentang rencana aksi daerah pangan gizi penurunan stunting. Dalam menyusun rencana aksi daerah pangan gizi, pemerintah daerah perlu mengacu dan selaras terhadap beberapa dokumen terkait antara lain:

a) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024.
b) Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah).
c) Peraturan daerah lainnya di bidang pangan dan gizi yang berlaku didaerah masing-masing.
d) Dokumen kebijakan lain yang terkait seperti: Stranas Percepatan Penurunan Stunting, RAD-TPB/SDGs, dan dokumen relevan lainnya terkait pembangunan pangan dan gizi.

Rencana aksi daerah pangan gizi disusun untuk memberikan rekomendasi melalui penyesuaian aksi dengan strategi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi daerah (local specific). Pemerintah daerah diharapkan dapat

menyusun kegiatan yang SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, Time Bond). Sebagai contoh pelaksanaan aksi cegah stunting di pusat yang spesifik menetapkan strategi percepatan pencegahan stunting ke dalam lima pilar dengan target 14,0% prevalensi stunting balita pada tahun 2024. Untuk menjamin penyelarasan dan implementasi kegiatan pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah maka periode mengikuti periode rencana aksi daerah pangan gizi. Namun demikian, rencana aksi daerah pangan gizi disusun juga selaras dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada didaerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra Oganisasi Perangkat Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah, dll. Selanjutnya, pelaksanaan RAD-PG disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD.

Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan rencana aksi daerah pangan gizi sebelum pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dapat terus melaksanakan aksi/ program/kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi daerah pangan gizi masing- masing dan tidak wajib mengikuti pedoman terbaru. Sedangkan pemerintah daerah yang belum menetapkan rencana aksi daerah pangan gizi wajib mengikuti pedoman ini paling lambat bulan setelah diterbitkannya regulasi yang menetapkannya. Dalam mengembangkan matriks aksi penajaman di dalam rencana aksi daerah pangan gizi, berikut ini definisi operasional yang digunakan dalam matriks penajaman strategi dan rencana aksi daerah pangan gizi.

1) Strategis adalah sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai. strategis rencana aksi pangan dan gizi dibagi menjadi empat yaitu a)Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; b) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; c) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial); d)Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.
2) Strategi adalah pendekatan menyeluruh berupa rencana cermat untuk melaksanakan gagasan tujuan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Strategi mengacu kepada rencana aksi daerah pangan gizi dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah.
3) Aksi adalah penjabaran strategi untuk menajamkan kegiatan yang ada di bidang pangan dan gizi. Aksi mengacu kepada rencana aksi daerah pangan gizi dengan menyesuaikan relevansi strategi tersebut kondisi daerah
4) Keluaran aksi/indikator kinerja adalah adalah hasil yang hendak dicapai dari aksi/kegiatan. Keluaran aksi/ indikator kinerja mengacu kepada

rincian belanja sub kegiatan pada bagian "keluaran dan hasil "yang akan diinput ke dalam SIPD Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pembentukan Forum Koordinasi

Tata kelola pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi daerah pangan gizi di daerah dapat disesuaikan dengan pengorganisasian kegiatan percepatan penurunan stunting di daerah atau membentuk organisasi atau forum baru sesuai dengan kebutuhan atas arahan kepala daerah. Forum Koordinasi rencana aksi daerah pangan gizi adalah wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis rencana aksi daerah pangan gizi dengan forum koordinasi yang sudah ada seperti percepatan penurunan stunting. Penyusunan Forum Koordinasi rencana aksi daerah pangan gizi disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap organisasi perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Sebagai referensi, berikut disajikan pada

Gambar 4.1 contoh alur koordinasi forum rencana aksi daerah pangan gizi. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan dan media massa/ jurnalis dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

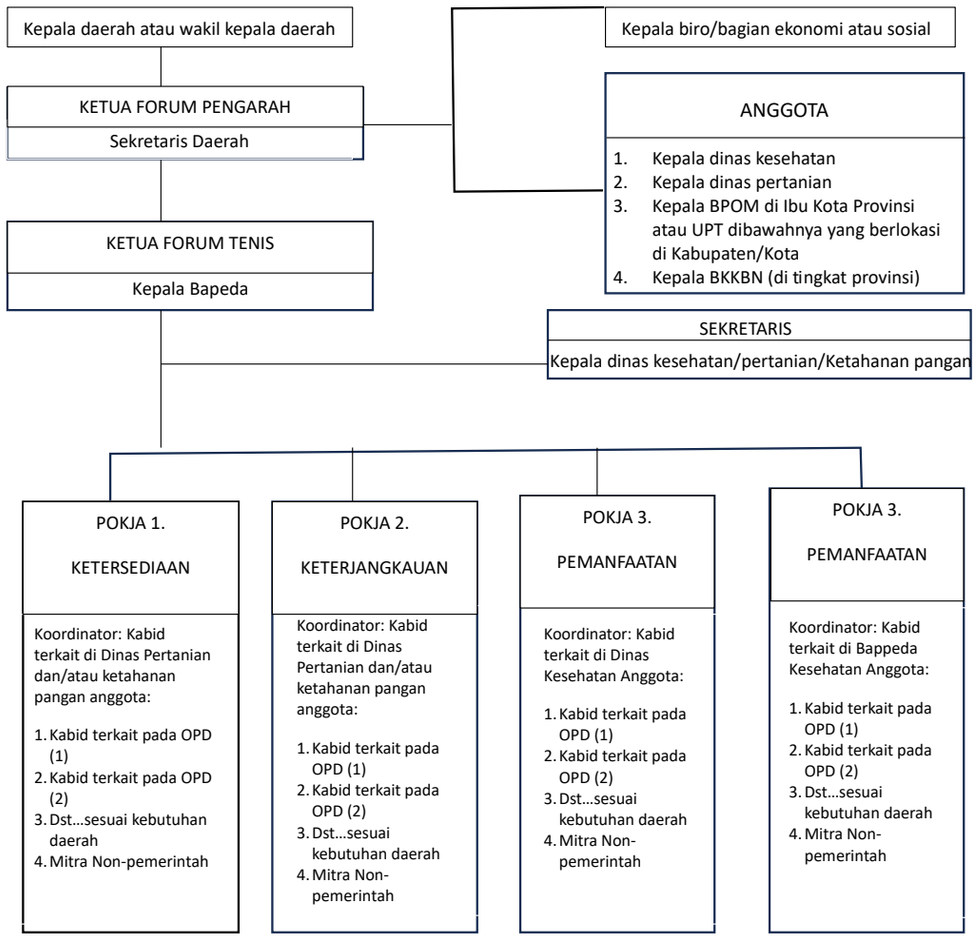

Gambar 4.1 Alur Koordinasi Forum Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi provinsi dan kabupaten/kota yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap rencana aksi pangan dan gizi mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Gambar 4.1 juga memperlihatkan anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah pada proses penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1) Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.
2) Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.
3) Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi. Pokja ini beranggotakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa: pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.
4) Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi. Pokja ini beranggotakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

A. Mekanisme Kerja

Pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akedemia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

a) Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal daripelaksanaan;
b) Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat
c) Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

STRATEGI DAN AKSI PANGAN DAN GIZI

Dalam rangka mencapai perbaikan pangan dan gizi dalam upaya membentuk sumber daya manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat yang cerdas produktif dan berdaya saing diperlukan strategi dan aksi pangan dan gizi. Strategi dan aksi pangan dan gizi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel Strategi dan Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
1.	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
			Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
			Pelaksanaan Pengawasan Kemananan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisiasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pemanfaatan Lahan Perkarangan Masyarakat	Pemanfaatan Lahan Perkarangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsomsi Pangan Perkapita /Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Olahan Pangan Lokal	Olahan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Dinas Perikanan
2.	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)		Pelaksanaan Pengawasan Kemananan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Pelaksanaan Pengawasan Kemananan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan(100 Tiyuh 3 Kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
3.	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kabupaten /kota	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (foodloss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah produksi komoditas pertanian	Dinas Pertanian
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terdampinginya kelompok dalam penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss melalui peningkatan kapasitas	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss					Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
5.	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada					Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan					Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
6.	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan terlaporkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	sosialisasi Kelembagaan dan Pasca Panen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	sosialisasi Kelembagaan dan Pasca Panen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan					Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan/Koperindag

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
8.	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan/Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/ BPNT	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan/Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
9.	Penyediaaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing					Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
10.	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	sosialisasi Kelembagaan dan Pasca Panen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi Kandang, Kebun, Kolam dan Wisata (3K1W)	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan Daerah Rawan dan Rentan Pangan Setiap Bulan	Ketahanan Pangan
12.	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Ketahanan Pangan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
13.	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Keanekaragaman Konsumsi Pangan dengan menggunakan produk Lokal	Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi B2SA	Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Dinas Perikanan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk meng-integrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	SK tim atau surat intruksi tentang pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Dinas Kesehatan
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	PPKB/DINSOS
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat /agama /politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku					DinasKominfo/ Kesehatan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA					DinasKominfo/ Kesehatan
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melaui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehtan penyakit menulalr dan tidak menular	Adanya sosialisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melaui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Dinas Kesehatan
		Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya capaian perilaku hidup sehat sebesar 8O%	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak					Dinas Pertanian/Kesehatan / Ketahanan Pangan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dab Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	SK Dashat	DINOS / PPKB
14.	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Kesehatan / Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Sosialiasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah					Kesehatan/ Pendidikan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
15.	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin,dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi B2SA	Ketahanan Pangan
16.	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan MakananPendamping Air Susu Ibu (MPASI) berbasis pangan lokal	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	SK ASI Eksklusif Kab/Kota	Dinas Kesehatan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita Usia 6-23 bulan konsumsi makanan beraneka ragam 80%	Dinas Kesehatan
17.	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tercapainnya pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 %	Dinas Kesehatan
		Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Juknis belanja	Dinas Kesehatan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Sosialisasi pemberian bubuk tabur gizi di posyandu	Dinas Kesehatan
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Sosialisasi pemberian bubuk tabur gizi di posyandu	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dinas Kesehatan
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16 Puskesmas melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kasus Obesitas menurun sebesar	Dinas Kesehatan
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah					Dinas Kesehatan
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya pekerja perempuan dapat perlindungan gizi	Dinas Kesehatan

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
18.	Pengendalian pemborosan pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Adanya Pemberian informasi mengurangi food waste melalui media cetak atau media internet	Dinas Kesehatan
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect					Koperindag
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste					Koperindag

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
19.	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Program Pembinaan Keluarga Berencana	pelaksanaan advokasi, komunikasi dan imformasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	Terealisasimya target kinerja,rencana kegiatan dan anggaran terkait pencegahan stunting	Dinas PPKB
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	pelaksanaan pembangunan keluargga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS ,PIK R dan usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	SK TPK dalam kegiatan pendataan dan penetapan sasaran rumah tangga 1000 HPK	Dinas PPKB
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PD di Provinsi dan					

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
20.	Penguatan peran sektor non pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah					Dinas Pertanian
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat,food loss dan food waste					
21.	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	PROGRAM PENGARUS PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN	Pelembagaan PengarusutamaanGender (PUG) pada LembagaPemerintah KewenanganKabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan danPendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	1.Persentaseanggaran responsive gender (ARG)2.Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	Dinas PP&PA
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif Gender dan hak anak sesuai standar.	Dinas PP&PA

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD Penanggung Jawab
				dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula,garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP rujukan tingat daerah kabupaten	Pengolahan Promosi kesehtan	Terlaksanya kegiatan GERMAS	PPPA/ Kesehatan
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP rujukan tingat daerah kabupaten	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengolahan upaya kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya sosialisasi kegiatan posyandu	PPPA/ Kesehatan
22.	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)					Dinas Pertanian

No.	Strategi	Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Aksi/ Indikator Kinerja	OPD
							Penanggung Jawab
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	sosialisasi Kelembagaan dan Pasca Panen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sosialisasi B2SA	Pertanian / Kesehatan / Ketahanan Pangan

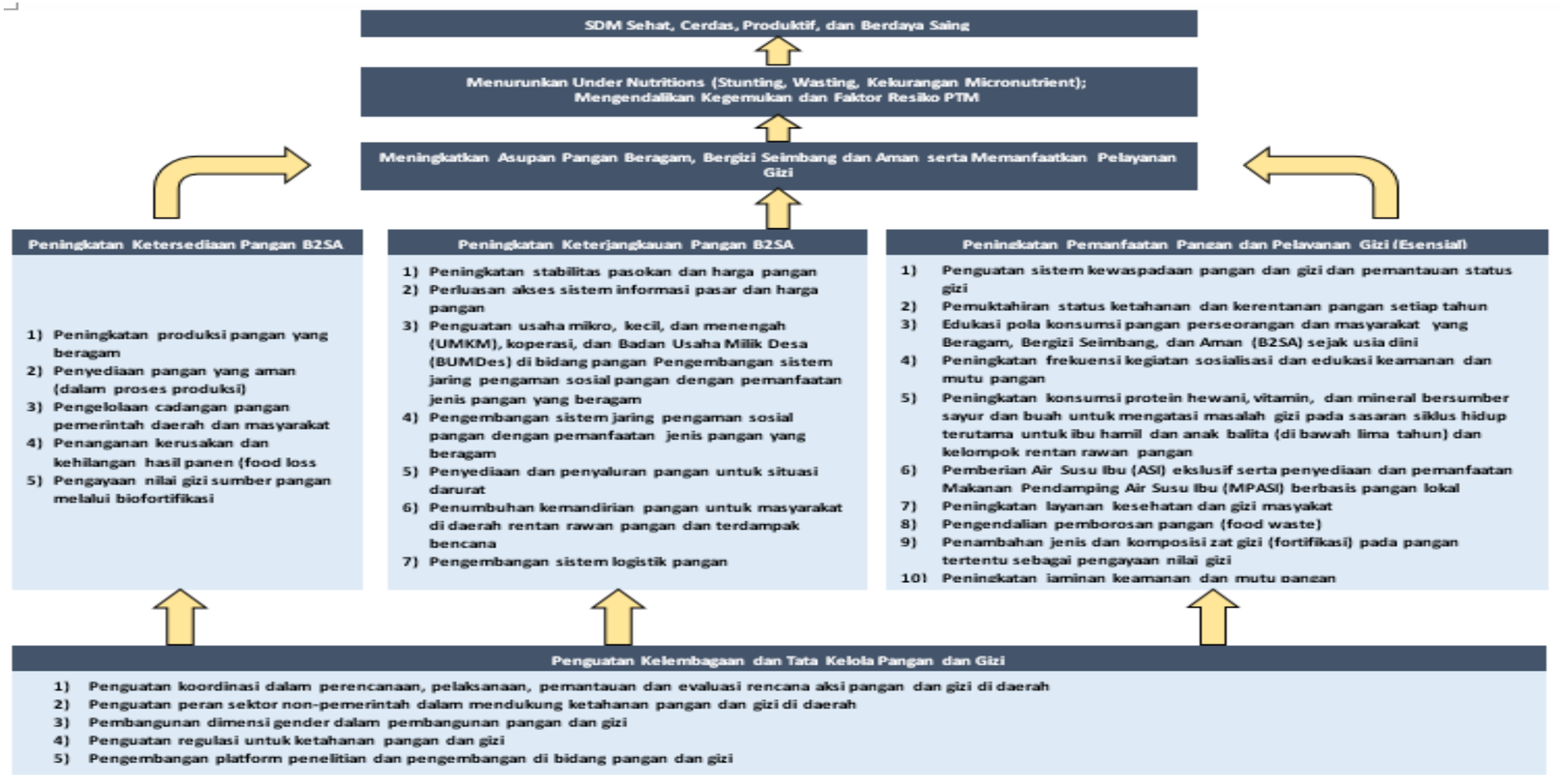
SDM Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing
Menurunkan Under Nutritions (Stunting, Wasting, Kekurangan Micronutrient); Mengendalikan Kegemukan dan Faktor Resiko PTM
Meningkatkan Asupan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman serta Memanfaatkan Pelayanan Gizi
Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA
1) Peningkatan produksi pangan yang beragam
2) Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)
3) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat
4) Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss
5) Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi
Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA
1) Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan
2) Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan
3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam
4) Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam
5) Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat
6) Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana
7) Pengembangan sistem logistik pangan
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
1) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi
2) Pemuktahiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun
3) Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini
4) Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan
5) Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan
6) Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) berbasis pangan lokal
7) Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyakat
8) Pengendalian pemborosan pangan (food waste)
9) Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi
10) Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
1) Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di daerah
2) Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di daerah
3) Pembangunan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi
4) Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi
5) Pengembangan platform penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi

PENGORGANISASIAN RAD PG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Prinsip pelaksanaan RAD-PG Multisektor di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah *collaborative actions* dari lembaga-lembaga dalam rangka pendekatan multisektor. Beberapa kelembagaan dan perannya dapat disampaikan sebagai berikut ini



Gambar 4. 2 Tim RAD PG Kabupaten Tulang Bawang Barat

PERAN SEKTOR NON PEMERINTAH

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemetrintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

PEMBIAYAAN

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAD-PG berasal baik dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5.
INTEGRASI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL

5.1 Integrasi dengan RPJMN dan RAN-PG Nasional

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029 selaras dengan arah kebijakan **RPJMN 2025–2029** dan **RAN-PG Nasional**. Integrasi diwujudkan dalam empat tujuan strategis RAN-PG:

1. Ketersediaan pangan,
2. Keterjangkauan pangan,
3. Pemanfaatan pangan,
4. Kelembagaan pangan dan gizi.

RAD-PG Tubaba mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting **<14% pada 2029**, serta berkontribusi pada **SDGs 2.2**: mengakhiri segala bentuk malnutrisi.

5.2 Keselarasan dengan RPJMD Tubaba 2025–2029

RAD-PG merupakan dokumen turunan dari **RPJMD Tubaba 2025–2029**. Seluruh strategi dan aksi dipetakan dengan **Renstra OPD** untuk sinkronisasi program, target, dan pendanaan. Matriks keterkaitan disajikan pada lampiran.

5.3 Keterkaitan dengan RPerpres Percepatan Penurunan Stunting

RAD-PG Tubaba memperkuat implementasi **RPerpres Percepatan Penurunan Stunting** melalui intervensi **gizi spesifik** (imunisasi, ASI, suplementasi) dan **gizi sensitif** (air bersih, sanitasi, pangan, perlindungan sosial).

5.4 Dukungan terhadap SDGs, Germas, dan PUG

RAD-PG mendukung pencapaian **SDGs 2030** (khususnya **Tujuan 2 Zero Hunger**). Selain itu, mendukung **Germas** dan **PUG** dengan isu lintas sektor:

- Pangan lokal & UMKM,
- Biofortifikasi,
- Respon darurat pangan,
- Keterlibatan perempuan.

BAB 6
PEMANTAUAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI

6.1 PEMANTAUAN

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

- Dilakukan **minimal 2 kali setahun**.
- Menggunakan **Form A (output)** dan **Form B (proses)**.
- Melibatkan lintas OPD, CSO, dan masyarakat melalui FGD & validasi data.

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat. Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga
7. memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
8. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
9. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/kota
   a. Substansi yang dipantau

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

1) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A;
2) Proses pelaksanaan RAD-PG dievaluasi melalui penilaian/skoring terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B. Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

b. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah OPD dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau OPD lain yang ditetapkan kepala daerah.

c. Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

d. Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi D.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut

menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;

3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama OPD dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
2) Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah OPD kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
4) Hasil kunjungan lapangan: Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan dengan metode skoring (skala 1-4) pada indikator kemajuan sebagai berikut. Format lebih lengkap dapat dilihat pada Form Evaluasi B.

1. Menguatkan Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Penanda kemajuan proses ini adalah:

a. *Mengembangkan Mekanisme Koordinasi di Daerah Masing-masing*- Penanda kemajuan ini melihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan atau mekanisme pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan RAD-PG

b. *Berkoordinasi Secara Internal dan Memperluas Mitra yang Dilibatkan* - Penanda kemajuan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam forum teknis RAD-PG serta melihat upaya meningkatkan pengaruh dengan melibatkan pemangku kepentingan baru yang berpotensi.

c. *Berkontribusi pada Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang paling relevan dengan ketahanan pangan dan gizi di daerah.

d. *Pelaporan dan Refleksi Kontribusi Serta Capaian yang Diraih* - Penanda kemajuan ini melihat apakah forum teknis RAD-PG melakukan pelacakan keuangan dan melaporkan implementasi tindakan yang disepakati, oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemampuan forum untuk mendorong akuntabilitas juga dipertimbangkan.

e. *Mempertahankan Dampak Politik dari Forum Teknis RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pendekatan multisektoral untuk ketahanan pangan dan gizi diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada sifatnya berkelanjutan.

2. Memastikan Kebijakan dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Keberadaan kebijakan yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

a. *Analisis Berkelanjutan Terhadap Peraturan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait pangan dan gizi (spesifik dan sensitif) yang ada, dianalisis menggunakan proses konsultatif multisektoral.

b. *Advokasi yang berkelanjutan Untuk Pengembangan, Pemutakhiran dan Penyebaran Kebijakan yang Relevan dengan Pangan dan Gizi*- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan pangan dan gizi dan diseminasinya (strategi advokasi dan komunikasi diterapkan untuk mendukung

diseminasi kebijakan yang relevan).

c. *Mengembangkan dan/atau Memperbarui Kebijakan Melalui Upaya Yang Terkoordinasi* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah - mengoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.

d. *Melaksanakan Kebijakan dan Peraturan* - Penanda kemajuan ini melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan, seperti peraturan mengenai ASI eksklusif dan cuti orang tua, fortifikasi pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, dan lainnya.

e. *Memantau dan Melaporkan Pembelajaran dan Dampak Kebijakan*- Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana kebijakan pangan dan gizi yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum teknis RAD-PG.

3. Menyelaraskan Kegiatan

Penyelarasan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi. Penanda kemajuan proses ini adalah:

a. *Sinkronisasi Program/Kegiatan Sesuai Target Pembangunan Pangan dan Gizi Nasional* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pangan gizi sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi.

b. *Menerjemahkan Kerangka Kebijakan dan Hukum ke Dalam Matriks Aksi RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui RAD-PG sebagai

instrumen untuk menyelaraskan intervensi di bidang pangan dan gizi dengan target pangan dan gizi yang teridentifikasi dengan jelas.

c. *Mengatur dan Melaksanakan Prioritas Tahunan yang Terdapat dalam RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat kegiatan prioritas dalam RAD-PG terlaksana di daerah.

d. *Bersama-sama Memantau Kegiatan Prioritas Sesuai Dengan RAD PG*- Penanda kemajuan ini melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk ketahanan pangan dan gizi.

e. *Mengevaluasi Implementasi Kegiatan RAD-PG Untuk Memahami, Mencapai, dan Mempertahankan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti bidang pangan dan gizi yang lebih baik.

4. Pelacakan Pendanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Penanda kemajuan proses ini adalah:

a. *Mengkaji Sumber Pendanaan dan Kemungkinan Pendanaan Lain untuk Kegiatan RAD-PG* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan RAD-PG lintas sektor. Data keuangan dibagikan secara transparan dengan mitra percepatan perbaikan gizi.

b. *Memantau dan Melaporkan Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melacak pengalokasian dan pengeluaran keuangan mereka (jika tersedia) di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru. Forum teknis RAD-PG harus dapat melaporkan data keuangan secara transparan.

c. *Menyelaraskan Sumber Daya Termasuk Mengatasi Kekurangan Pendanaan Kegiatan* - Penanda kemajuan ini melihat apakah pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi

kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, (termasuk dari mekanisme/inisiatif pembiayaan baru), melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan RAD-PG.

d. *Distiribusi Pendanaan* - Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan mengubah alokasi pendanaan menjadi pencairan yang sebenarnya.

e. *Melakukan Kajian dan Penganggaran Pendanaan Tahunan Untuk Menjamin Keberlangsungan Pelaksanaan Kegiatan* – Penanda kemajuan ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka Panjang untuk dampak yang lebih baik. Ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi dan mengatasi kesenjangan pendanaan.

5. Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting

Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD-PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RADPG.

a. *Analisis Situasi*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memaksimalkan penggunaan analisis situasi seperti: analisis sebaran analisis sebaran masalah stunting; analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan; analisis penyampaian layanan pada sasaran; analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antar lokasi.

b. *Penyusunan Rencana Kegiatan*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG dalam menyusun rencana program dan kegiatan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting.

c. *Rembuk Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu menjadi memanfaatkan RAD-PG instrumen advokasi sekaligus sosialisasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam rembuk stunting.

d. *Sistem dan Manajemen Data Stunting*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu memanfaatkan RAD-PG untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan data; menilai sistem manajemen data saat ini; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan sistem data; melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data.

e. *Review Kinerja Tahunan*

Penanda kemajuan ini melihat bagaimana forum koordinasi RADPG atau forum koordinasi percepatan penurunan stunting mampu mengelaborasi data hasil pemantauan dan evaluasi RADPG untuk melaksanakan kegiatan review kinerja tahunan; mengidentifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan, serta menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan.

6.2 EVALUASI

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid- term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi). Apabila pemerintah daerah melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja – Form A (Output)

No	Indikator Output	Satuan	Sumber Data	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	OPD PJ
1	Prevalensi stunting balita	%	e-PPGBM/Dinkes	21,8	20	14,0	Dinkes
2	Prevalensi wasting balita	%	e-PPGBM/Dinkes	7,5	7,0	5,0	Dinkes
3	Cakupan ASI eksklusif bayi 0–6 bulan	%	Dinkes	61,0	65	75,0	Dinkes
4	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	Dinkes	79,0	82	90,0	Dinkes
5	Proporsi rumah tangga dengan akses pangan beragam	%	BPS/Susenas	78,0	80	90,0	BPS/DKP
6	Rumah tangga dengan sanitasi layak	%	BPS/Dinkes	72,0	75	85,0	Dinkes
7	Rumah tangga dengan akses air minum layak	%	BPS/Susenas	70,0	74	85,0	Dinkes/ PUPR
8	Ibu hamil penerima suplementasi zat besi	%	Dinkes	76,0	80	90,0	Dinkes
9	Keluarga penerima manfaat bantuan pangan	%	Dinsos	28,0	26	20,0	Dinsos
10	Sekolah yang menyediakan kantin sehat	%	Disdik	35,0	40	60,0	Disdik

6.3 RENCANA TINDAK LANJUT RAD – PG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan RAD-PG akan muncul setelah pemantauan dan evaluasi dilaksanakan. Kendala-kendala yang ditemukan akan berdampak pada capaian rencana aksi yang tidak memenuhi target. Kendala-kendala ini merupakan suatu masalah yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan lebih lanjut.

Tabel 6.3 Indikator Proses – Form B (Kelembagaan & Tata Kelola)

No	Indikator Proses	Kriteria Pengukuran	Sumber Data	Frekuensi Monev	OPD PJ
1	Koordinasi lintas sektor pangan & gizi	Jumlah rapat/tahun	Notulen Bappeda	2 kali/tahun	Bappeda
2	Pelibatan masyarakat & CSO	Jumlah FGD/kegiatan partisipatif	Laporan OPD	Tahunan	Bappeda/Desa
3	Integrasi RAD-PG dengan RPJMD/OPD	Persentase OPD yang mengadopsi aksi RAD-PG	Renstra OPD	1 kali/5 th	Bappeda
4	Dukungan anggaran	% program RAD-PG didanai	APBD/APBN	Tahunan	BPKAD
5	Kualitas data pangan & gizi	Jumlah indikator tersedia & terlapor	Laporan Dinkes/BPS	Semesteran	Dinkes/Bappeda
6	Kapasitas SDM pelaksana	Jumlah pelatihan/workshop	Laporan OPD	Tahunan	Dinkes/Disdik
7	Monitoring stunting & gizi	Jumlah desa/kelurahan melaksanakan pemantauan	e-PPGBM	Semesteran	Dinkes
8	Sinergi dengan program nasional	Jumlah program pusat diadopsi	Laporan OPD	Tahunan	Bappeda
9	Respon cepat pangan darurat	Jumlah kasus krisis pangan ditangani	BPBD/Dinsos	Tahunan	BPBD/Dinsos
10	Inovasi pangan lokal & UMKM	Jumlah UMKM pangan difasilitasi	Diskopdag	Tahunan	Diskopdag

6.4 LAPORAN

Alur Pelaporan dan Tindak Lanjut

- **Alur pelaporan:** OPD pelaksana → Tim Koordinasi RAD-PG Kab. → Bappeda → Provinsi → Nasional.
- **Tindak lanjut:** digunakan untuk perbaikan perencanaan, pengisian gap program, dan peningkatan dukungan anggaran.

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Tujuan pelaporan RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara lain :

a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

BAB 7
PENUTUP

7.1 KESIMPULAN DAN PENUTUP

RAD-PG Tubaba 2025–2029 menjadi instrumen integrasi strategi nasional–daerah dalam bidang pangan dan gizi, mendukung target **RPJMN, SDGs, Germas, PUG, dan percepatan penurunan stunting**. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 merupakan kebijakan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mendukung komitmen pencapaian nasional sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat ini merupakan perencanaan sistematis dalam mencapai target-target Pembangunan bidang pangan dan gizi yang dijabarkan secara kuantitatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RAD-PG ini selanjutnya akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, baik jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD, maupun jangka pendek/tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun anggaran sampai dengan tahun 2029. RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun oleh perangkat daerah terkait, secara bersamasama dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan operasionalisasi Sistem Kewaspadaan dan Gizi (SKPG) yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat ini secara sinergis memerlukan dukungan pendanaan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Lampung, dan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan implementasi atas RAD-PG Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sangat tergantung dari partisipasi segenap pihak, mulai dari pengelola program di tingkat OPD, oranisasi profesi, perguruan tinggi, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan juga wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peran legislatif ini sangat penting dalam hal kebijakan dan dalam alokasi penganggaran. Selanjutnya langkah-langkah proaktif perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha termasuk perbankan sebagai bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

7.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui forum pangan-gizi.
2. Mengoptimalkan UMKM pangan, pangan lokal, dan biofortifikasi.
3. Menjamin keberlanjutan pendanaan aksi RAD-PG.
4. Memperkuat pemantauan berbasis data terintegrasi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan akhir ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk disahkan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisiyang terjadi dalam kehidupan masyarakat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009